



**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTsS BALIMBING  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Penyelesaian Studi (S-1)  
Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

*Oleh*  
**APRILA AMANDA PUTRI**  
**NIM. 2130103011**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**



**EDUCATIONAL FINANCING MANAGEMENT AT MTsS BALIMBING,  
TANAH DATAR REGENCY**

**THESIS**

*Submitted as a Requirement for the Completion of Undergraduate Studies (S-1)  
in the Islamic Education Management Study Program*

*By:*

**APRILA AMANDA PUTRI**

**Student ID: 2130103011**

**ISLAMIC EDUCATION MANAGEMENT STUDY PROGRAM  
FACULTY OF TARBIYAH AND TEACHER TRAINING  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 AD/1447 H**



داتارت ناه محافظه - باليم بدينج MTSS مدرسه في ال تعلم تمويل إدارة

### أطروحة

(1-ك تبت كأحد م تطل بات إنهاء الدراسة ل نيل درجة ال بكالوريوس (S)  
برنامج دراسة إدارة ال تعلم الإسلامي في

إعداد:

بوتري أمانددا أوريلا  
ال قيد رقم: ٢١٣٠١٠٣٠١١

برنامج إدارة ال تعلم الإسلامي  
كلية ال تربية وعلوم ال تعلم  
الجامعة الإسلامية الحكومية محمود يونس  
باتو سونغكار  
١٤٤٧هـ / م ٢٠٢٥

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprila Amanda Putri  
NIM : 2130103011  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar” adalah karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025  
Penulis,

Aprila Amanda Putri  
NIM. 2130103011



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Aprila Amanda Putri, NIM 2130103011, dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025  
Pembimbing,

Dr. Abhanda Amra, M. Ag.  
NIP. 196904041997031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aminn.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, semangat, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mukhlis dan Ibunda Elmiati. Mereka berdualah yang menjadi alasan utama penulis mampu bertahan hingga titik ini, dengan segala kasih sayang, doa yang tak pernah putus, dan dukungan tanpa syarat yang selalu mereka berikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kakak-kakak tersayang Nova Mustika dan Yanti Novita, A.Md., yang selalu menjadi penyemangat, tempat berbagi, dan sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan selama menjalani studi dan proses penulisan skripsi ini. Penulis juga juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, M.A. M.Res., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ridwal Trisoni, S.Ag., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan dan juga memberikan izin untuk melakukan penelitian agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Vicky Rizki Febrian., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan juga segenap Bapak/Ibu dosen dan staff UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan pelayanan dan Administrasi terkhusus di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.
4. Bapak Dr. H. Asmendri, S.Ag., M.Pd selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi serta bimbingan selama masa studi penulis.
5. Bapak Dr. Abhanda Amra, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Jamilus, M. Pd. I selaku ketua penguji sidang Munaqasyah, yang telah mengarahkan dan juga telah memberikan masukan kepada penulis agar dapat menyempurnakan karya ilmiah ini.
7. Bapak Vicky Rizki Febrian, M. Pd selaku anggota penguji sidang Munaqasyah, yang juga telah memberikan pengarahan dan juga memberikan pemasukan kepada penulis agar dapat menyempurnakan karya ilmiah ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yang telah membagikan ilmu pengetahuan, wawasan dan bimbingan selama masa perkuliahan, serta turut membentuk karakter akademik penulis.
9. Staff administrasi Fakultas dan Program Studi, yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaik dalam urusan administrasi perkuliahan maupun penyusunan skripsi, sehingga proses akademik penulis dapat berjalan dengan lancar.

10. Kepala MTsS Balimbing, Bapak Arwin, S. Pd. I, M. Pd, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan sekolah. Bapak Hamdanil, S.Pd, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, yang telah membantu dan memfasilitasi keperluan teknis selama penelitian berlangsung. Ibu Weri, S.Pd, selaku bendahara sekolah, yang telah mendukung kelancaran kegiatan penelitian baik secara administratif maupun moril, Ibu Rahma, selaku guru yang telah dengan ramah dan terbuka membantu proses pengumpulan data serta mendampingi penulis selama di lapangan. Ibu Eka Mardia, selaku orang tua siswa, yang turut berpartisipasi dan memberikan informasi penting dalam mendukung kelengkapan data penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, staf, dan siswa MTsS Balimbing yang telah berkenan menerima kehadiran penulis dan memberikan bantuan selama proses penelitian.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman terbaik: Ismi Annisa Khair Hidayat, yang selalu memberikan dorongan, dan semangat kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga telah menjadi teman seperjuangan dalam suka maupun duka.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, memohon ampunan, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal jariyah hendaknya dan diberikan balasan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

Batusangkar, Agustus 2025  
Penulis,

Aprila Amanda Putri  
NIM. 2130103011

## ABSTRAK

Aprila Amanda Putri, NIM: 2130103011, judul skripsi: “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar”. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar. Skripsi ini fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut. Penelitian ini penting karena pembiayaan pendidikan yang efektif dan transparan merupakan elemen vital untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks MTsS Balimbing, terdapat tantangan dalam pengelolaan dana, seperti Manajemen Pembiayaan Pendidikan, MTsS Balimbing, Perencanaan, Pelaksanaan, Dana BOS.

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti kepala madrasah, bendahara, guru, dan perwakilan orang tua siswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan di MTsS Balimbing dilaksanakan dalam dua tahapan utama: perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak termasuk kepala madrasah, bendahara, dan wakil kepala madrasah. Dana BOS menjadi sumber utama pembiayaan, yang kemudian didukung oleh sumbangan dari masyarakat, penggalangan dana, dan bantuan dari pihak lain. Tahap pelaksanaan didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) yang telah disusun, disertai dengan pengawasan internal dan partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga dan material. Meskipun menghadapi keterbatasan dana, sekolah berhasil menerapkan strategi alternatif berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing berjalan secara sistematis dan kolaboratif, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang diawasi secara internal maupun eksternal, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan akuntabel.

**Kata kunci:** Manajemen Pembiayaan Pendidikan, MTsS Balimbing, Perencanaan, Pelaksanaan, Dana BOS.

## ABSTRACT

Aprila Amanda Putri, Student ID: 2130103011, thesis title: “*Educational Financing Management at MTsS Balimbing, Tanah Datar Regency.*” Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Mahmud Yunus State Islamic University Batusangkar, 2025.

This study aims to describe the educational financing management at MTsS Balimbing, Tanah Datar Regency. The thesis focuses on the planning and implementation of educational financing at the school. This research is significant because effective and transparent educational financing is a vital element in improving the quality of education. In the context of MTsS Balimbing, there are challenges in fund management, such as Educational Financing Management, MTsS Balimbing, Planning, Implementation, and BOS (School Operational Assistance) Funds.

This research employs a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants such as the principal, treasurer, teachers, and representatives of students’ parents.

The results of the study show that financial management at MTsS Balimbing is carried out in two main stages: planning and implementation. The planning stage is conducted systematically and participatively, involving various stakeholders including the principal, treasurer, and vice principal. BOS funds serve as the main source of financing, supported by community contributions, fundraising, and external assistance. The implementation stage is based on the Madrasah Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBM), accompanied by internal supervision and community participation in the form of contributions in labor and materials. Despite financial limitations, the school has successfully applied community-based alternative strategies to ensure the sustainability of educational programs. The conclusion of this study is that the educational financing management at MTsS Balimbing is conducted in a systematic and collaborative manner, with well-structured planning and implementation supervised both internally and externally, thus supporting the achievement of educational goals effectively and accountably.

**Keywords:** Educational Financing Management, MTsS Balimbing, Planning, Implementation, BOS Funds.

## المخلص

ليومت قرادإ: "قل اسرل ان اوع، ١١ أب ريد لا أماندا ب و تري، رقم القيد: ٣٠١٠٣١٢. محافظة تناه داتار". ب رنامج دراسة إدارة -ال تعلیم في مدرسة SsTM بال یم ینج الحكومية ال تعلیم الإسلامي، كلية التربية والعلوم ال تعلیمية، الجامعة الإسلامية بات و سدنكار، ٢٠٢٥م. -محمود و ن س

قضاء تناه داتار. تركز هذه -باليمينج MTsS يهدف هذا البحث إلى وصف إدارة تمويل التعليم في مدرسة الرسالة على تخطيط وتنفيذ تمويل التعليم في المدرسة. وتعد هذه الدراسة مهمة لأن التمويل الفعال والشفاف سي ل تحسین جودة ال تعلیم. في سياق مدرسة SsTM ل ال تعلیم هو عنصر أساسی یم ینج، ت وجدت حديات في إدارة الأموال م ثل: إدارة تمويل ال تعلیم، ال تخطيط، ال تنفيذ، و تمويل ب رنامج SOB.

تم استخدام المنهج النوعي في هذا البحث مع المقاربة الفينومينولوجية. وقد جُمعت البيانات من خلال مصادر معلومات رئيسية م ثل مدير المدرسة، وأمين ال صندوق، مقابلات معمقة مع والمعلمين، ومم ثلین عن أولیاء الأمور.

أظهرت نتائج ال بحث أن عملية إدارة ال تمويل في مدرسة SsTM بال یم ینج ت تم في مرحلتين أساسيتين: ال تخطيط وال تنفيذ. ي تم ال تخطيط بشكل منهجي ا مدير المدرسة، وأمين الصندوق، ونائب المدير. ويُعد و تشاركي ب مشاركة عدة أطراف من ینه المصدر الرئيسي للتمويل، ويُدعم بعد ذلك من خلال تبرعات المجتمع المحلي، وجمع BOS تمويل التبرعات، والمساعدات من جهات أخرى. ويتم تنفيذ الخطة استنادًا إلى خطة ميزانية دخل ونفقات المدرسة اخلية ومشاركة مجتمعية من خلال المساهمات المادية د قباقر دوجوع م، (RAPBM) والمعنوية. وعلى الرغم من محدودية ال تمويل، ف قد نجحت المدرسة في ت طبق اس تراتجيات بديلة قائمة على ال مجتمعية لضمان استمرارية ال برامج ال تعلیمية.

تُدار بطريقة منهجية جن ي ب م ي ل اب MTsS واستخلص من هذا البحث أن إدارة تمويل التعليم في مدرسة وتعاونية، من خلال تخطيط جيد وتنفيذ يخضع للإشراف الداخلي والخارجي، مما يسهم في تحقيق الأهداف ال تعلیمية ب فعالية ومساءلة.

، طيختل ا، جن ي ب م ي ل اب MTsS قسردم، ميل عتلا ليومت قرادإ: ال كلمات ال م ف تاحية ال تنفيذ، تمويل SOB.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Pertanyaan Penelitian.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Luaran Penelitian .....	10
H. Definisi Operasional .....	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Manajemen Pendidikan.....	13
2. Pembiayaan Pendidikan .....	18
B. Penelitian Relevan .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
C. Instrumen Penelitian .....	43
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	47

G. Teknik Keabsahan Data .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Temuan Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	67
1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan .....	68
2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan .....	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Implikasi .....	84
C. Saran .....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	43
Tabel 4. 1 Profil sekolah MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar .....	50
Tabel 4. 2 Data Guru MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian .....	89
Lampiran 2 Panduan Observasi Tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar .....	90
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	91
Lampiran 4 Transkrip Wawancara .....	97
Lampiran 5 Surat Mohon Izin Penelitian dari Kampus .....	112
Lampiran 6 Balasan Surat Penelitian .....	113
Lampiran 7 Laporan Keuangan Triwulan 1 MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar .....	114
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian .....	115

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan pondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, inovasi dapat dikembangkan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Di Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi sebuah keharusan yang memerlukan dukungan berbagai komponen, salah satunya adalah pembiayaan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi untuk memberikan arah yang jelas bagi setiap kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan. Selain itu, tujuan tersebut juga menjadi target utama yang ingin dicapai melalui seluruh proses pendidikan.

Salah satu ukuran kualitas suatu negara adalah tingkat pendidikannya. Salah satu dari banyak indikator kualitas suatu bangsa adalah tingkat pendidikannya. Sekolah adalah lembaga yang dilengkapi untuk menyediakan sumber daya manusia berkualitas tinggi, menurut Nasser (2021). Kualitas suatu bangsa akan meningkat seiring dengan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran krusial dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam.

Pentingnya pendidikan telah ditegaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam aspek spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan

secara sistematis, terstruktur, dan menyeluruh agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di tengah dinamika zaman.

Dalam implementasinya sistem pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari dukungan pembiayaan yang memadai. Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber daya yang memadai, khususnya dalam bentuk pendanaan untuk menunjang berbagai aktivitas dan sarana prasarana pendidikan. Dalam teori manajemen Pendidikan pembiayaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang vital dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu elemen paling krusial dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pendidikan. Pengelolaan biaya pendidikan yang efektif diperlukan untuk mencapai kualitas sekolah yang tinggi. Oleh karena itu, fase-fase pengelolaan dana pendidikan harus diperhatikan. Mencapai tingkat kualitas sekolah yang diinginkan merupakan tujuan utama pengelolaan dana pendidikan. Mewujudkan visi dan tujuan sekolah adalah tujuan utama di setiap tahap proses pengelolaan dana. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan pendidikan merupakan fase-fase dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, biaya pendidikan juga sangat penting karena diperlukan untuk mendukung proses pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan, terutama pendidikan nasional, yang bergantung pada sejumlah komponen untuk berhasil.

Manajemen keuangan adalah tindakan mengelola dan mengendalikan dana sekolah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pendidikan. Dipercaya, saat sekolah mengelola keuangan dengan baik, elemen manajemen lainnya akan mengikuti, menghasilkan lulusan berkualitas tinggi. Mengelola sumber daya keuangan lembaga pendidikan dan menyediakan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan, manajemen keuangan pendidikan sangat bermanfaat. Secara teknis, lembaga pendidikan swasta dan negeri mengelola keuangan mereka secara berbeda. Sekolah swasta perlu menunjukkan kualitas sekolah

yang luar biasa sebab mereka mendapatkan dana dari sumber lain selain BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan pendidikan adalah pendanaan. Pengelolaan biaya pendidikan yang efektif diperlukan untuk mencapai kualitas sekolah yang tinggi. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan fase-fase pengelolaan dana pendidikan. Mencapai tingkat kualitas sekolah yang diinginkan adalah tujuan utama pengelolaan pendanaan pendidikan. Mencapai visi dan tujuan sekolah adalah prioritas utama di setiap tahap proses pengelolaan pendanaan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendanaan pendidikan merupakan fase-fase dalam pengelolaan pendanaan pendidikan.

Ketersediaan dan pengelolaan dana yang memadai merupakan hal yang sangat vital dalam menjalankan dan mengembangkan lembaga pendidikan. Tanpa dukungan dana yang cukup, pelaksanaan berbagai program pendidikan, penyediaan fasilitas, serta peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan akan sulit terlaksana. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai biaya semata, melainkan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Manajemen pembiayaan pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Manajemen yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan transparan. Dengan pengelolaan yang tepat, pemborosan dapat diminimalkan, sementara alokasi dana dapat difokuskan pada program-program prioritas yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Adapun surat yang menjelaskan mengenai pembiayaan pendidikan yaitu surat Al-Mujadilah ayat ke 13 yaitu

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤُنُكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, mengajarkan bahwa kontribusi finansial (seperti sedekah) untuk mendapatkan akses ilmu tidak boleh menjadi beban bagi yang tidak mampu. Allah memberikan keringanan kepada mereka yang ingin belajar (berbicara dengan Rasul) namun tidak mampu bersedekah, dengan menggantinya melalui pelaksanaan kewajiban dasar seperti shalat, zakat, dan ketaatan.

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang tercermin dalam ayat ini yaitu :

1. Pembiayaan harus adil dan proporsional, memperhatikan kemampuan peserta didik.
2. Tidak boleh ada hambatan finansial yang menghalangi akses terhadap pendidikan.
3. Sistem pembiayaan pendidikan sebaiknya mengakomodasi subsidi, zakat, dan beasiswa bagi yang membutuhkan, sebagai bentuk keringanan dan keadilan sosial.

Ayat ini menegaskan pentingnya nilai inklusivitas dan kemudahan dalam menuntut ilmu, sekaligus menekankan bahwa tanggung jawab spiritual dan sosial tetap menjadi pilar utama pendidikan dalam Islam.

Surat Al-Mujadillah ayat 13 memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggung jawab bagi mereka yang memangku tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Dalam ayat ini Allah Swt, memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang ingin bertanya (belajar)

kepada Rasulullah Saw, tapi mereka tidak mampu untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin, maka Allah memberikan keringanan berupa penggantian kewajiban dengan mendirikan sholat, atau membayar zakat dan ta'at kepada Allah dan Rasulnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menaruh perhatian terhadap keadilan dan kemudahan dalam akses memperoleh ilmu, sebagaimana tercermin dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Al-Mujadilah ayat 13. Kontribusi finansial seperti sedekah tidak dijadikan sebagai syarat mutlak bagi individu yang tidak mampu, melainkan digantikan dengan kewajiban ibadah yang bersifat spiritual dan sosial. Dalam ranah pendidikan, hal ini menjadi dasar bahwa sistem pembiayaan perlu bersifat inklusif, adil, serta tidak membatasi peluang belajar karena alasan ekonomi. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan dukungan berupa zakat, subsidi, dan beasiswa sebagai wujud tanggung jawab sosial dan spiritual, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan pendidikan tanpa mengalami diskriminasi.

Tersedianya dana yang cukup serta pengelolaannya secara tepat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Ketika dukungan pendanaan tidak memadai, berbagai program pendidikan, pengadaan fasilitas, dan peningkatan mutu pembelajaran akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, dana pendidikan tidak seharusnya dianggap sekadar sebagai pengeluaran, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia yang memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial secara berkelanjutan.

Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Proses manajemen ini mencakup perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana pendidikan. Tujuan utama dari manajemen ini adalah memastikan bahwa setiap dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal, efisien, dan transparan agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Pengelolaan

yang tepat akan mengurangi pemborosan dan mengarahkan dana kepada program-program prioritas yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Madrasah Tsanawiyah (MTs), sebagai jenjang pendidikan menengah pertama di bawah Kementerian Agama, memiliki karakteristik khusus. MTs tidak hanya menyelenggarakan pendidikan umum, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Peran ganda ini menuntut adanya dukungan pembiayaan yang lebih kompleks, karena harus memenuhi standar kurikulum umum sekaligus menjaga keunikan pendidikan agama.

MTsS Balimbing tetap berusaha memberikan layanan terbaik kepada peserta didik meskipun menghadapi tantangan terkait keterbatasan pembiayaan pendidikan. Salah satu wujud perhatian yang diberikan berupa pemberian satu stel baju seragam gratis bagi siswa baru yang bergabung dengan madrasah. Pelaksanaan program tersebut dapat terealisasi berkat bantuan para donatur serta hasil pengajuan proposal yang disampaikan pihak madrasah kepada berbagai lembaga atau individu yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Langkah ini menunjukkan komitmen madrasah dalam memenuhi kebutuhan dasar siswa, meskipun berada dalam kondisi keuangan yang terbatas.

Meskipun sumber pembiayaan MTsS Balimbing berasal dari masyarakat, swadaya, zakat, dana bos, kegiatan malam amal seperti tabligh akbar, dan juga bantuan dari anggota DPRD Kabupaten maupun provinsi. pengelolaan dana di tingkat MTs sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa MTs mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap sumber dana, sementara yang lain menghadapi masalah dalam efisiensi alokasi dan transparansi penggunaan dana. Masalah-masalah ini dapat langsung memengaruhi kualitas pembelajaran, ketersediaan fasilitas, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

Mengingat pentingnya pembiayaan pendidikan dan kompleksitas dalam pengelolaannya, terutama di MTs Balimbing, diperlukan sebuah kajian yang mendalam terkait praktik manajemen pembiayaan yang sedang

dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MTs Balimbing melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, serta pelaporan dana pendidikan, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam manajemen pembiayaan di MTs Balimbing.

Secara khusus, di MTs Balimbing Kabupaten Tanah Datar, masalah terkait manajemen pembiayaan pendidikan sering muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, pada tahap perencanaan anggaran, proses penyusunannya terkadang belum melibatkan seluruh pihak terkait di madrasah, sehingga kebutuhan yang sebenarnya belum dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, keterbatasan dana, terutama yang berasal dari masyarakat dengan kondisi ekonomi yang beragam, menjadi hambatan dalam menjaga kelangsungan program unggulan maupun pemeliharaan fasilitas yang memerlukan biaya besar.

Terkait pemanfaatan dan pelaporan dana, sering muncul kendala yang berkaitan dengan ketidaktepatan penggunaan alokasi dana yang tidak sesuai sasaran serta kurangnya transparansi saat proses pelaporan dilakukan. Situasi seperti ini dapat memicu munculnya persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan para penyumbang dana, termasuk orang tua siswa maupun pemerintah. Di samping itu, rendahnya pemahaman mengenai prinsip efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga berisiko menimbulkan pemborosan atau penggunaan dana yang tidak sejalan dengan prioritas kebutuhan madrasah.

Berdasarkan pentingnya pembiayaan pendidikan dan kompleksitas pengelolaannya di institusi pendidikan, khususnya di MTs, serta adanya indikasi masalah khusus di MTs Balimbing Kabupaten Tanah Datar, maka sangat diperlukan kajian mendalam mengenai praktik manajemen pembiayaan yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana MTs Balimbing merencanakan, mengelola, memanfaatkan, dan mempertanggungjawabkan dana pendidikan yang mereka miliki. Selain itu,

studi ini juga ingin menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Balimbing.

Karena itu, penulis ingin membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perencanaan pembiayaan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola MTs Balimbing serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi manajemen pembiayaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Peningkatan kualitas manajemen pembiayaan ini pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di MTs Balimbing, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan berfokus terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

#### C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan berfokus terhadap:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

#### D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar ?

2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan apa saja perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupasten Tanah Datar
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

#### F. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan penulis peroleh melalui penelitian yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

##### 2. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi siapa saja yang berminat dibidang pendidikan yaitu tentang manajemen pembiayaan pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan dan perkembangan peserta didik.

##### 3. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang penting bagi sekolah untuk pengembangan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan terutama di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.
- b. Bagi peneliti, peneliti memberikan pengalaman langsung tentang implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan prestasi siswa di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

## G. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah koleksi khazanah ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## H. Definisi Operasional

### 1. Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan cabang ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen umum dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh institusi pendidikan. Pada dasarnya, manajemen pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan (motivasi), pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya yang ada di lembaga pendidikan. Sumber daya tersebut mencakup kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas, serta pendanaan, yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Amini, 2024).

Menurut George R. Terry, manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pendapat serupa disampaikan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selaras dengan itu, Burhanudin Tolla mengartikan manajemen pendidikan sebagai upaya mengelola sumber daya manusia, materi, dan metode pembelajaran dalam institusi pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, manajemen pendidikan dapat dipahami sebagai proses pengelolaan yang sistematis, strategis, dan

terpadu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan (Kamaruddin et al., 2022).

## 2. Pembiayaan Pendidikan

Menurut Zulkarmain (2020) dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Jangan Karena Mahal Sekolah Batal", pembiayaan pendidikan mencakup semua jenis pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun tenaga yang dapat diukur secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya meliputi biaya dalam bentuk uang saja, tetapi juga mencakup berbagai sumber daya non-moneter yang mendukung proses pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah proses penyaluran sumber daya, terutama dana, untuk mendukung pelaksanaan aktivitas pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Nursobah (2022), pembiayaan pendidikan meliputi pengalokasian sumber daya pada kegiatan atau program operasional pendidikan. Pendapat ini sejalan dengan Sudarmono dan rekan-rekannya (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan merupakan pendanaan yang disediakan oleh pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga.

## 3. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan mencakup serangkaian aktivitas yang berfokus pada pengorganisasian sumber dana, pemanfaatan, serta pertanggungjawaban keuangan di sekolah atau institusi pendidikan. Proses ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pendidikan, karena pengelolaan dana yang tepat dan efisien akan membantu pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Menurut Rusdiana (2022), kegiatan manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi perencanaan anggaran, identifikasi berbagai sumber pendanaan, penentuan prioritas alokasi anggaran, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dan

pemeliharaan aset pendidikan. Dengan penerapan manajemen yang efektif, lembaga pendidikan mampu mengelola dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, donatur, maupun wali murid, dan mendistribusikannya sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen Pendidikan

###### a. Pengertian Manajemen Pendidikan

Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang manajer yang mampu membesarkan sebuah organisasi maupun suatu lembaga. Dalam bahasa Inggris, manajer disebut sebagai *manage* (kata kerja), dan *manager* (kata benda), bagi orang-orang yang bekerja dengannya. Dalam bahasa Indonesia, manajemen disebut sebagai pengelolaan (Salehah, 2018).

Secara umum, manajemen dapat dipandang sebagai sebuah kegiatan yang mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan organisasi. Tujuan utama manajemen adalah untuk mencapai efisien dan efektivitas dalam organisasi, pengelompokan sumber daya, pelaksanaan tugas, serta pengendalian dan evaluasi. Peran seorang manajer adalah memilih dan menerapkan konsep manajemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dipimpinnya. Seorang manajer harus mampu mengidentifikasi pendekatan manajerial yang akan memberikan hasil optimal dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Suhardi dan Anis Eliyana, 2018).

Rudani (2020) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, pengarahan, serta pengendalian terhadap upaya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif (Rudani, 2020).

Menurut Randall B. Dunham (dalam Kurniasih, 2024), manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian berbagai sumber daya

organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi, dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kurniasih, 2024).

Secara keseluruhan, manajemen dapat dipahami sebagai kombinasi seni dan ilmu yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan sumber daya—baik manusia, material, mesin, uang, metode, maupun pasar—dengan tujuan mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Inti dari manajemen adalah pencapaian tujuan melalui kolaborasi dengan orang lain.

Manajemen pendidikan merupakan cabang ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip manajemen umum dengan karakteristik khusus yang dimiliki oleh institusi pendidikan. Pada dasarnya, manajemen pendidikan melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan (motivasi), pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya yang ada di lembaga pendidikan. Sumber daya tersebut mencakup kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas, serta pendanaan, yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Amini, 2024; Journal STIT Pernalang, t.t.; Yuliana et al., 2024). Tujuan utama dari manajemen pendidikan adalah mengoptimalkan proses pembelajaran dan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, manajemen pendidikan dipahami sebagai proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan strategi dan upaya yang terencana untuk mengelola berbagai sumber belajar dan aspek terkait lainnya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Yuliana et al., 2024). Manajemen ini juga mencakup pembentukan karakter dan mental siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, aktif, dan kreatif. Dengan kata lain, manajemen pendidikan tidak hanya

sebatas administrasi teknis, melainkan juga merupakan seni dan ilmu dalam mengelola keseluruhan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, manajemen pendidikan berupaya menyelaraskan berbagai komponen dalam sistem pendidikan agar dapat bekerja sama secara sinergis. Fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan strategis yang matang, organisasi yang terstruktur, pelaksanaan yang terarah dan profesional, pengawasan yang konsisten, serta evaluasi yang menyeluruh sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien (Yuliana et al., 2024). Dengan pendekatan yang adaptif dan inovatif, manajemen pendidikan memastikan lembaga pendidikan mampu berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta menghadapi tantangan zaman demi kelangsungan peradaban manusia.

Adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai manajemen pendidikan yaitu Al Quran Surat An Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Tafsir Al-Misbah Surat An-Nisa ayat 58 menekankan bahwa manajemen pendidikan harus didasarkan pada prinsip amanah, yaitu tanggung jawab yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh integritas, serta keadilan yang memastikan setiap pihak mendapatkan haknya secara adil tanpa diskriminasi. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga semua proses dan

penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selain itu, perencanaan yang matang menjadi kunci agar pengelolaan berjalan terarah dan efektif. Nilai-nilai moral dan spiritual menjadi fondasi utama dalam manajemen pendidikan, karena dengan landasan tersebut, pengelolaan tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi juga membawa manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat.

Ayat ini menjelaskan bahwa manajemen pendidikan harus berlandaskan pada prinsip amanah dan keadilan, di mana tanggung jawab dijalankan dengan integritas dan hak setiap pihak dihormati secara adil. Pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terencana menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Selain itu, nilai moral dan spiritual menjadi fondasi penting agar manajemen pendidikan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, dan masyarakat luas.

#### b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah rangkaian kegiatan penting yang harus dijalankan oleh seorang manajer guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Walaupun terdapat berbagai pendapat mengenai jumlah dan istilah fungsi tersebut, konsep dasar yang paling umum dan banyak digunakan berasal dari Henry Fayol dan George R. Terry, yang dikenal dengan singkatan POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian). Dalam praktik manajemen modern, fungsi evaluasi sering kali ditambahkan sebagai bagian penting untuk mendukung proses perbaikan secara berkelanjutan.

#### 1) Perencanaan (*Planning*)

merupakan fungsi awal dan paling mendasar dalam manajemen. Fungsi ini mencakup penetapan tujuan yang hendak dicapai di masa depan, penyusunan strategi, serta pembuatan rencana operasional untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam proses perencanaan, organisasi menentukan apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan, di mana, dan bagaimana pelaksanaannya. Perencanaan yang matang berperan sebagai panduan yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi.

#### 2) Pengorganisasian (*Organizing*)

adalah langkah berikutnya setelah perencanaan. Fungsi ini fokus pada pengalokasian dan koordinasi sumber daya, baik manusia, material, maupun keuangan, serta pembagian tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian meliputi pembentukan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan kerja antar unit atau individu. Dengan pengorganisasian yang efektif, setiap bagian dalam organisasi dapat bekerja secara sinergis dan efisien tanpa adanya tumpang tindih tugas.

#### 3) Pelaksanaan atau Penggerakan (*Actuating/Directing/Leading*)

adalah fungsi yang bertujuan menggerakkan dan memotivasi anggota organisasi agar menjalankan rencana yang telah dibuat. Fungsi ini mencakup kepemimpinan, komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan, serta pemberian arahan dan dorongan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Fokus utama dari fungsi ini adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia demi pencapaian sasaran organisasi.

#### 4) Pengawasan (*Controlling*)

merupakan fungsi yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan kinerja, membandingkannya dengan standar atau target yang telah ditentukan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila

ditemukan penyimpangan. Fungsi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, kualitas terpenuhi sesuai standar, dan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, pengawasan juga berperan sebagai sistem umpan balik yang membantu dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang.

#### 5) Evaluasi (*Evaluating*)

meskipun sering dianggap sebagai bagian dari fungsi pengawasan, juga dapat dipandang sebagai fungsi tersendiri yang berfokus pada penilaian secara sistematis terhadap efektivitas dan efisiensi suatu program atau kinerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai hasil yang dicapai, mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan, serta memberikan rekomendasi guna perbaikan dan pengembangan di masa depan. Fungsi ini sangat penting dalam proses pembelajaran organisasi dan pengambilan keputusan strategis.

## 2. Pembiayaan Pendidikan

### a. Pengertian pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan yang berkualitas, meliputi seluruh nilai uang atau pengorbanan sumber daya, baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter, yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pendidikan. Menurut literatur terkini, pembiayaan pendidikan tidak hanya mencakup dana yang diterima oleh institusi, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dialokasikan secara efektif untuk menjaga keberlanjutan serta meningkatkan mutu pendidikan (In'am & Ma'sum, t.t.; Jurnal Indopedia, 2023). Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan memiliki cakupan luas yang mencakup aspek pendapatan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.

Secara lebih detail, pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai total dana yang diperoleh dan digunakan untuk berbagai

kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ruang lingkungannya sangat luas, meliputi pembayaran gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kemampuan guru, perbaikan fasilitas belajar, pengadaan sarana dan prasarana seperti alat-alat, buku pelajaran, dan perlengkapan kantor, serta dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler dan program pendidikan lainnya yang telah disetujui (In'am & Ma'sum, t.t.; Surahman, t.t.; Yuliana et al., 2024). Inti dari pembiayaan pendidikan adalah kemampuan lembaga untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti pemerintah, masyarakat atau orang tua, donatur, hingga usaha mandiri lembaga, serta mengelola dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Para ahli membagi pembiayaan pendidikan ke dalam beberapa kategori, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi mencakup pengeluaran untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dalam jangka panjang, serta modal kerja tetap. Biaya operasional adalah dana yang digunakan untuk aktivitas rutin yang diperlukan agar proses pendidikan berjalan lancar, seperti pembayaran gaji, pemeliharaan fasilitas, dan pembelian alat habis pakai. Sedangkan biaya personal merupakan pengeluaran yang harus ditanggung oleh peserta didik atau keluarganya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, misalnya uang sekolah, biaya buku, dan transportasi. Pembiayaan pendidikan yang terkoordinasi dan transparan dari berbagai sumber ini sangat penting untuk memastikan mutu dan kelangsungan proses pendidikan (Jurnal Indopedia, 2023; Surahman, t.t.; Yuliana et al., 2024).

Seperti yang dinyatakan oleh E. Menurut Mulyasa, yang dikutip dalam buku oleh Mohammad Rojii, pendanaan adalah sumber dana yang dapat membantu efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen kunci dalam

pengelolaan pendidikan dan faktor dalam operasional program pendidikan yang efisien (Mohammad Rojii, 2018).

Dalam konteks ini, semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan baik berupa uang, barang, maupun tenaga kerja termasuk dalam biaya yang disebutkan.

Menurut Rahmat Hidayat bahwa surat al-Mujadilah ayat 12-13 memberikan gambaran tentang konsep pembiayaan pendidikan dalam Islam. Surah al-Mujaidah Ayat 12-13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجْوَانِكُمْ  
 صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾  
 ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نُجْوَانِكُمْ صَدَقْتُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؕ وَاللَّهُ  
 خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: (12).Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(13) Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Tafsir tahlili riwayat Ibnu Abī Ḥātim dari Ibnu ‘Abbās, diterangkan bahwa para sahabat banyak yang ingin bertanya kepada Rasulullah saw, sehingga membebaninya. Untuk meringankan bebannya, Allah menurunkan ayat ini, dengan memerintahkan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah. Ayat ini memerintahkan

kepada orang-orang yang beriman apabila mereka ingin berbicara secara rahasia dengan Rasulullah saw tentang sesuatu hal yang penting, hendaklah bersedekah sebelum melakukan pembicaraan itu. Perintah itu untuk membuktikan kebesaran Rasulullah dengan mengagungkannya, dan mendatangkan manfaat kepada fakir-miskin. Hal ini juga untuk membedakan antara orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan mengharapkan pelajaran darinya, dengan orang munafik yang berbeda perkataan dan perbuatannya.

Di sisi lain, perintah ini mencegah orang yang datang beramai-ramai kepada Rasulullah tanpa keperluan yang sangat penting sehingga menyibukkan beliau. Menurut Abu Muslim, Allah memerintahkan demikian karena orang-orang munafik yang mulutnya menyatakan iman, sedang hatinya tetap kafir. Menyatakan bahwa mereka masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Untuk menguji pernyataan itu, maka turun perintah untuk bersedekah lebih dahulu sebelum menghadap Rasulullah. Faedah memberi sedekah ialah mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah, membersihkan dan menyucikan harta yang dimiliki, serta membersihkan jiwa dari keinginan mengumpulkan harta dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Suka bersedekah dapat mengurangi kesengsaraan orang-orang fakir dan dapat pula meninggikan kalimat Allah. Harta yang disedekahkan itu langsung diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tidak diberikan kepada Nabi saw, karena di antara tujuan sedekah itu ialah mengagungkan Rasulullah saw dan meringankan beban hidup fakir-miskin.

Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa jika orang yang akan menghadap Rasulullah saw itu tidak mempunyai sesuatu yang akan disedekahkan, sedangkan ia memerlukan sekali bertemu dengan beliau, maka Allah memberikan keringanan kepadanya dengan tidak mengharuskannya bersedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah sunah, bukan sedekah wajib, dan jumlahnya pun tidak

ditentukan, hanya menurut keikhlasan dan kesanggupan yang memberi. Yang ditekankan ayat ini ialah agar kaum Muslimin suka bersedekah, tidak kikir, dan sadar bahwa harta yang mereka peroleh itu semata-mata sebagai alat untuk mencari keridaan Allah. Keharusan memberi sedekah dalam ayat ini untuk menguji kemauan orang-orang munafik yang baru masuk Islam.

Penjelasan dari Ayat 12 memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis. Allah Swt. Memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw. untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan sebagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu. Ayat 13 memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, bahwa kaum muslimin yang ingin bertanya (belajar) kepada Rasulullah saw. tapi mereka tidak mampu untuk memberi sedekah kepada fakir miskin, maka Allah memberikan keringanan berupa penggantian kewajiban dengan mendirikan shalat, atau membayar zakat dan ta`at kepada Allah dan rasul-Nya

Menurut deskripsi di atas, pembiayaan pendidikan adalah setiap investasi yang dilakukan dalam pendidikan yang mendukung proses pembelajaran, baik dalam bentuk uang tunai maupun layanan. Masyarakat, orang tua, dan pemerintah semua berkontribusi dalam biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk kemajuannya dan memastikan bahwa pendidikan disampaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana. Untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa dan tenaga pendidik, pendanaan merupakan komponen krusial dalam pendidikan yang dialokasikan ke sistem manajemen administratif.

## b. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan

Anwar menyatakan bahwa terdapat dua kategori biaya pendidikan dalam buku Pratiwi Bernadetta (Pratiwi Bernadetta Purba, 2020), yaitu:

### 1) Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya langsung merujuk pada pengeluaran dana yang digunakan secara langsung untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Biaya ini meliputi segala pengeluaran yang berhubungan langsung dengan aspek dan proses pendidikan itu sendiri.

Dana yang digunakan secara langsung untuk mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, pelayanan masyarakat, dan pendidikan disebut sebagai biaya langsung. Ini mencakup pengeluaran yang secara langsung terkait dengan komponen dan prosedur pendidikan.

Cara lain untuk mendefinisikan biaya pendidikan adalah sebagai pengeluaran yang secara langsung terkait dengan komponen dan prosedur pendidikan. Pengeluaran berulang. Selama tahun anggaran, pengeluaran berulang adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai operasi pendidikan. Pelaksanaan program pendidikan, gaji guru, tenaga kependidikan, pengelolaan kantor, dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sekolah dapat didukung oleh pengeluaran ini.

### 2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Pengeluaran yang seringkali tidak secara langsung membantu proses pendidikan di sekolah disebut sebagai pengeluaran tidak langsung. Ada beberapa kategori pengeluaran tidak langsung, seperti:

#### a) Biaya pribadi (*private cost*)

Ini adalah pengeluaran yang ditanggung oleh orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Pengeluaran ini

meliputi pembayaran terkait sekolah swasta, biaya transportasi, dan biaya sekolah.

b) Biaya masyarakat (*social cost*)

Ini adalah pengeluaran yang ditanggung oleh masyarakat, serta keluarga dan individu, untuk membiayai kebutuhan sekolah.

c. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Di Indonesia, sumber pembiayaan pendidikan berasal dari berbagai pihak seperti pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pemerintah juga telah mengimplementasikan berbagai program untuk mendukung pembiayaan pendidikan, seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan tujuan untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata (Nadhifa Ardiana Maharani et al., 2024). Dana BOS merupakan salah satu bentuk investasi fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan operasional sekolah sehingga peserta didik dapat menikmati pembelajaran tanpa beban biaya langsung. Sedangkan program BSM yang kini terintegrasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan untuk menjamin keberlanjutan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Program-program pembiayaan pendidikan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, yang tidak hanya menekankan pada pemerataan akses, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan dana di tingkat satuan pendidikan.

Semua pihak yang mendukung dan berkontribusi pada lembaga pendidikan, baik melalui saluran resmi maupun melalui masyarakat luas, dianggap sebagai sumber pendanaan pendidikan. Pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua (melalui Kontribusi Pengembangan Pendidikan, atau SPP), dan masyarakat setempat adalah beberapa contoh sumber pendanaan atau pengeluaran yang ditanggung

oleh lembaga resmi. Pemerintah, orang tua, dan masyarakat adalah sumber pendanaan utama untuk pendidikan.

#### 1) Sumber dana pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang membiayai semua kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Kegiatan (DIK) dan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Proyek (DIP), merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat memberikan dukungan keuangan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah daerah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan di bidang yang relevan dan pengembangan lembaga pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan keuangan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

#### 2) Sumber dana dari Masyarakat

Donasi dari individu, lembaga amal, atau perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang sangat berkomitmen pada kemajuan pendidikan merupakan contoh sumber pendanaan berbasis masyarakat. Sumber pendanaan ini dianggap sangat efektif dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan pendidikan, terutama dalam operasional sekolah swasta.

Sumber dana dari masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, terutama untuk lembaga swasta, yang sering kali bergantung pada kontribusi eksternal untuk kelancaran operasional dan pembangunan fasilitas pendidikan.

#### 3) Orang Tua/Wali Murid

Orang tua dan wali juga turut berkontribusi dalam biaya pendidikan selain dukungan pemerintah dan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan orang tua sering disebut sebagai SPP dan infaq. Biaya pendidikan dasar yang ditanggung keluarga dapat berupa berbagai bentuk, seperti biaya pendaftaran, biaya bulanan sekolah (SPP),

biaya kegiatan ekstrakurikuler, dan biaya pengembangan serta operasional sekolah.

Kemudian Sumber pembiayaan/anggaran pendidikan menurut Habibi et al., (2022) ada 7, yaitu :

1) Anggaran Pendidikan Nasional

Anggaran pendidikan nasional mencakup semua penerimaan kas dari negara yang secara sengaja diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah. Contohnya adalah dana pendampingan operasional, dana hibah kompetitif, biaya operasional sekolah (BOS), dan lain-lain.

2) Anggaran Pendidikan Provinsi.

Pendapatan biaya yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada sekolah-sekolah berasal dari kas negara. Bantuan ini mencakup buku, hibah untuk pembangunan ruang kelas baru, dana pembangunan kembali sekolah, beasiswa murid, dan banyak lagi.

3) Anggaran Pendidikan Kota/Kabupaten

Pendapatan uang dari pemerintah provinsi untuk sekolah berasal dari kas kota/kabupaten dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti buku, bangku, meja, pelatihan kurikulum, hibah pembangunan kelas baru, rekonstruksi sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

4) Anggaran Komite Sekolah.

Pendanaan dari orang tua siswa dapat berupa uang, buku, seragam, alat tulis, bahan ajar, biaya bulanan, dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, dan berbagai bentuk bantuan lainnya.

5) Anggaran Yayasan

Bantuan yang diberikan oleh pengurus yayasan sekolah untuk program pendidikan sekolah dapat berupa buku, alat tulis, meja, kursi, tanah, bangunan, atau untuk pendanaan rutin seperti beasiswa bagi guru dan siswa.

#### 6) Anggaran Donatur

Sumbangan yang diberikan oleh donatur perorangan atau lembaga tertentu untuk mendukung program sekolah dapat berupa dana, jasa, atau barang. Contohnya, dana hibah dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, *World Association Moslem Youth* (WAMY), dan lain-lain.

#### 7) Anggaran Lain

Pendapatan, jasa, dan barang dapat berasal dari penjualan produk buatan siswa, lelang aset sekolah, kegiatan ekonomi koperasi sekolah, dan sumber-sumber lainnya.

#### d. Langkah-langkah Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Adapun langkah-langkah didalam perencanaan pembiayaan Pendidikan yaitu

##### 1). Analisis Kebutuhan dan Tujuan Pendidikan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan tujuan pendidikan. Ini melibatkan penetapan tingkat pendidikan yang ingin dicapai (misalnya, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, atau pendidikan kejuruan), jenis institusi (negeri, swasta, internasional), dan spesialisasi atau program studi yang diminati. Analisis ini juga mencakup pertimbangan terkait kualitas pendidikan yang diinginkan, potensi beasiswa, dan kebutuhan khusus (misalnya, kursus tambahan, bimbingan belajar).

##### 2). Estimasi Biaya Pendidikan

Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengestimasi total biaya pendidikan. Ini mencakup:

- a. Biaya Langsung: Uang sekolah/kuliah, biaya pendaftaran, sumbangan pengembangan institusi, biaya praktikum/laboratorium, dan biaya ujian.

- b. Biaya Tidak Langsung: Buku, alat tulis, seragam, transportasi, akomodasi (jika di luar kota), makanan, dan biaya hidup sehari-hari.
- c. Biaya Lain-lain: Kegiatan ekstrakurikuler, kursus tambahan, bimbingan belajar, dan keperluan pribadi.

Penting untuk mencari informasi biaya terbaru dari institusi pendidikan yang relevan dan mempertimbangkan potensi inflasi biaya pendidikan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa sumber daya online atau konsultan pendidikan juga dapat membantu dalam estimasi ini.

### 3). Evaluasi Sumber Pendanaan

Langkah ini melibatkan identifikasi dan evaluasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi:

- a. Dana Pribadi/Keluarga: Tabungan, investasi, pendapatan rutin, atau aset yang dapat dicairkan.
- b. Beasiswa: Beasiswa merit-based (berdasarkan prestasi), need-based (berdasarkan kebutuhan finansial), beasiswa pemerintah, swasta, atau institusi. Penting untuk aktif mencari informasi beasiswa sejak dini.
- c. Pinjaman Pendidikan: Pinjaman bank, pinjaman pemerintah, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Pertimbangkan suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pengembalian.
- d. Bantuan Keuangan Lainnya: Hibah, program kerja-studi, atau dana dari lembaga filantropi.

#### 4). Penyusunan Rencana Keuangan

Setelah sumber pendanaan diidentifikasi, susunlah rencana keuangan yang komprehensif. Ini melibatkan:

- a. Penetapan Target Tabungan: Menentukan jumlah yang perlu ditabung secara berkala untuk mencapai target biaya pendidikan.
- b. Strategi Investasi: Jika memungkinkan, pertimbangkan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu investasi (misalnya, reksa dana pendidikan, obligasi, saham).
- c. Manajemen Arus Kas: Membuat anggaran untuk pengeluaran bulanan dan memastikan ada sisa dana yang dapat dialokasikan untuk pendidikan.
- d. Perencanaan Kontingensi: Mempersiapkan dana darurat untuk situasi tak terduga (misalnya, biaya medis, perubahan biaya pendidikan yang mendadak).

#### 5). Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana

Langkah terakhir adalah melaksanakan rencana dan memantau perkembangannya secara berkala. Ini meliputi:

- a. Disiplin Menabung/Berinvestasi: Konsisten dalam menyisihkan dana sesuai rencana.
- b. Evaluasi Berkala: Tinjau kembali rencana keuangan setidaknya setahun sekali atau saat ada perubahan signifikan dalam kondisi finansial atau biaya pendidikan.
- c. Penyesuaian Rencana: Bersiap untuk menyesuaikan rencana jika ada perubahan dalam estimasi biaya, ketersediaan dana, atau tujuan pendidikan.
- d. Pencarian Peluang Baru: Tetap membuka diri terhadap peluang beasiswa atau bantuan keuangan baru yang mungkin muncul.

e. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Adapun langkah-langkah yang terdapat didalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu

a. Penerimaan Dana

Pada tahap ini, lembaga pendidikan menerima dana dari berbagai sumber, seperti:

- a). Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
- b). Iuran peserta didik
- c). Sumbangan dari masyarakat
- d). Bantuan instansi pemerintah atau swasta

Penyaluran dana dilakukan berdasarkan jadwal yang telah yang telah ditentukan, dan semua penerimaan dicatat secara tertib. Tujuannya adalah memastikan seluruh dana yang masuk tercatat dan terdokumentasi dengan rapi sebagai dasar pertanggungjawaban.

b. Penggunaan Dana

Setelah dana diterima, tahap berikutnya adalah penggunaan sesuai dengan rencana anggaran. Penggunaan dana meliputi:

- a). Biaya operasional harian sekolah
- b). Pembayaran honorarium guru dan pegawai
- c). Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d). Pemeliharaan sarana dan prasarana

Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disusun sebelumnya.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini disusun secara berkala dan disampaikan kepada:

- a). Kepala madrasah
- b). Komite sekolah
- c). Kantor Kementerian Agama setempat

Langkah ini bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan.

Berdasarkan artikel karya Nofrion (2019), pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada madrasah mencakup tiga tahapan utama, yaitu

penerimaan dana, penggunaan dana, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerimaan dana berasal dari berbagai sumber dan dicatat secara tertib. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Ketiga tahap ini saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan efektif, efisien, dan transparan.

f. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip manajemen umum dengan pengelolaan seluruh sumber daya keuangan dalam lingkungan lembaga pendidikan. Menurut Suharmoko (dalam Scribd, 2023), pembiayaan pendidikan mencakup segala usaha dan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai pendidikan, baik melalui anggaran, sumbangan, beasiswa, maupun sumber lain, dengan tujuan mencapai target pendidikan yang diinginkan.

Sejalan dengan itu, manajemen pembiayaan pendidikan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalian sumber dana, pencatatan, pengeluaran, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan (Scribd, 2023). Tujuannya adalah memastikan dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya mutu pendidikan yang optimal.

Proses ini membentuk siklus manajemen pembiayaan yang berkelanjutan dan saling terkait, meliputi beberapa tahapan berikut:

1) Perencanaan Anggaran (Budget Planning)

Tahap ini menjadi dasar utama, di mana lembaga pendidikan mengidentifikasi kebutuhan finansial untuk mewujudkan visi dan misinya. Menurut Nanang Fattah perencanaan anggaran adalah proses penyusunan anggaran yang mencakup penetapan tujuan pembiayaan, strategi pengadaan dan alokasi dana, serta penyusunan

rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) secara menyeluruh. Perencanaan yang baik akan menjadi pedoman untuk langkah-langkah berikutnya (Jurnal Indopedia, 2023; UMS, t.t.).

## 2) Penganggaran (Budgeting)

Setelah perencanaan, tahap ini melibatkan penetapan dan persetujuan resmi terhadap anggaran yang telah disusun. Anggaran berfungsi sebagai rencana operasional yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam periode tertentu. Proses ini biasanya melibatkan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala madrasah, komite madrasah, dan yayasan untuk melegitimasi rencana keuangan dan menetapkan batasan pengeluaran.

## 3) Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)

Tahap ini merupakan penerapan dari anggaran yang sudah disetujui. Dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, program pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran gaji, serta pengembangan lainnya sesuai prioritas yang telah ditentukan. Pelaksanaan harus dilakukan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

## 4) Penata usahaan (Administrasi Keuangan)

Fokus tahap ini adalah pencatatan sistematis semua transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak berwenang. Kegiatan ini meliputi pembukuan rapi, penyimpanan bukti transaksi seperti kuitansi dan faktur, serta pengelolaan kas dan rekening bank untuk memastikan keakuratan data keuangan dan kemudahan pelacakan dana.

## 5) Pelaporan (Reporting)

Secara berkala, lembaga pendidikan wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Laporan ini penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan mendukung pengambilan keputusan. Pelaporan juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada berbagai pihak terkait, seperti orang tua siswa, komite madrasah, pemerintah, dan donatur.

#### 6) Pengawasan (Controlling/Auditing)

Tahap terakhir dalam siklus ini adalah pemantauan dan evaluasi seluruh proses pembiayaan. Pengawasan bertujuan memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana, menghindari penyimpangan, dan mencapai efisiensi yang diharapkan. Pengawasan dapat dilakukan melalui audit internal oleh pihak madrasah maupun audit eksternal oleh badan pengawas untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana.

Dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen ke dalam setiap tahapan pembiayaan, lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangannya secara strategis untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

#### g. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Yang Efektif

Manajemen pembiayaan pendidikan yang efisien merupakan faktor utama dalam mengatasi berbagai kendala serta menjamin kelangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan. Efektivitas manajemen pembiayaan mengacu pada sejauh mana tujuan penggunaan dana pendidikan dapat dicapai dengan hasil yang optimal. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana yang memadai, tetapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan kontribusi positif yang berarti terhadap mutu pembelajaran dan pengembangan madrasah secara menyeluruh.

Penerapan manajemen pembiayaan yang efektif didasarkan pada sejumlah prinsip penting yang saling terkait.

### 1) Prinsip efisiensi,

yaitu penggunaan dana secara optimal untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin. Hal ini mengharuskan penghindaran pemborosan dan penyaluran dana hanya pada aktivitas yang benar-benar memberikan manfaat signifikan bagi proses pendidikan. Santoso (2018) menegaskan bahwa efisiensi dalam pembiayaan pendidikan merupakan upaya untuk memaksimalkan hasil dari setiap biaya yang dikeluarkan.

### 2) Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dana. Institusi pendidikan wajib menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntabilitas ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah sebagai penyedia dana, tetapi juga kepada masyarakat dan orang tua siswa sebagai pemangku kepentingan utama (Rusdiana, 2022).

### 3) Prinsip transparansi

merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan. Informasi yang terbuka mengenai sumber dana, jumlah dana yang diterima, detail penggunaan, serta hasil yang diperoleh harus disampaikan dengan jelas kepada semua pihak terkait. Transparansi ini memungkinkan adanya pengawasan sosial dan keterlibatan aktif masyarakat dalam memonitor pengelolaan dana pendidikan, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan (Jurnal Indopedia, 2023).

Selain prinsip-prinsip tersebut, keberhasilan manajemen pembiayaan sangat bergantung pada perencanaan strategis yang menyeluruh. Proses perencanaan ini harus dimulai dengan analisis kebutuhan yang detail, penetapan tujuan yang jelas dan terukur, serta prioritas program yang sejalan dengan visi dan misi madrasah.

Penyusunan anggaran perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kepala madrasah, guru, komite madrasah, dan wakil orang tua, agar anggaran yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata dan disetujui bersama (Rusdiana, 2022).

Selanjutnya, pelaksanaan dan pengawasan yang teliti merupakan tahap yang sangat penting. Penggunaan dana harus sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, disertai pencatatan yang rapi dan terorganisir. Mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal, seperti audit dan pemantauan rutin, perlu dijalankan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, langkah korektif harus segera dilakukan. Pengawasan yang efektif akan menjaga integritas keuangan madrasah dan memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana.

Terakhir, evaluasi dan pelaporan menjadi tahap akhir yang tidak kalah penting. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana penggunaan dana efektif dan program yang didanai berhasil. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa depan serta penyusunan anggaran berikutnya. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu kepada pihak terkait merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi yang wajib dijalankan. Dengan demikian, manajemen pembiayaan yang efektif merupakan sebuah siklus berkelanjutan yang terus diperbaiki berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Strategi manajemen pembiayaan yang efektif mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

- 1) Perencanaan yang didasarkan pada dokumen resmi seperti Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang menjadi dasar dalam pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah.
- 2) Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan, contohnya penggunaan aplikasi ARKAS yang mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan secara transparan.

- 3) Keterlibatan aktif seluruh pihak di sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, bendahara, serta komite sekolah, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana.

Beberapa tantangan utama dalam manajemen pembiayaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, dominasi anggaran untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, serta rendahnya kemampuan dalam mencari sumber dana alternatif. Selain itu, ketergantungan pada dana pemerintah dan perubahan kebijakan turut menambah kompleksitas pengelolaan pembiayaan.

Manajemen pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pendidikan. Pelaksanaan manajemen pembiayaan yang strategis dan melibatkan berbagai pihak memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan, yang terlihat dari tersedianya sarana belajar yang berkualitas, pelatihan guru, dan program peningkatan mutu pembelajaran.

Penguatan kapasitas pengelola keuangan sekolah melalui pelatihan yang berkelanjutan dan optimalisasi sistem pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan manajemen pembiayaan yang berkelanjutan dan efektif.

## B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil penelitian yang membahas mengenai dengan topik yang sedang diteliti. Dalam penelusuran dan telaah yang dilakukan, berbagai literature dan hasil penelitian relevan berhasil diidentifikasi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis yang mendukung dan memperkaya pemahaman terhadap kajian ini, penelitiannya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Makmur Syukri dkk (2024) dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan Dasar,

dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Manajemen Pembiayaan Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan Dasar merupakan studi kepustakaan yang membahas bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan berperan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dan mengakui peran pentingnya dalam pembangunan mutu pendidikan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan dan objek kajian. Artikel ini bersifat teoritis dan konseptual, berbasis studi pustaka tanpa meneliti sekolah tertentu. Sementara itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan objek khususnya yaitu MTsS Balimbing dan mengumpulkan data langsung dilapangan.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Adzka (2022) yang berjudul Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMP Islam Terpadu Rahmatan Lil Alamin Bogor dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Proses manajemen pembiayaan pendidikan di SMP IT Rahmatan Lil Alamin memiliki dampak pada peningkatan mutu lulusan. Hal tersebut terlihat dari berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan di SMP IT Rahmatan Lil Alamin dengan tujuan pengembangan karakter siswa dengan penerapan budaya religius di sekolah, dan peningkatan keterampilan siswa mengacu kompetensi 4C baik bersifat kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu terdapat kepuasan orang tua murid terhadap lulusan SMP IT Rahmatan Lil Alamin yang memiliki kepribadian sesuai dengan visi misi sekolah. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan akan lebih berfokus kepada Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara peneliti diatas lebih berfokus kepada Analisis Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMP Islam Terpadu Rahmatan Lil Alamin Bogor.

3. Temuan studi oleh Mesiono dkk. (2020) berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan)” menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat adalah meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Sebagai administrator dan pemangku kepentingan dalam pendidikan, pemerintah dan masyarakat telah mengambil sejumlah inisiatif strategis untuk mencapainya. Salah satunya adalah pemerintah telah menetapkan standar pendidikan nasional. Komponen paling krusial dan integral dalam administrasi pendidikan adalah pendanaan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah menyediakan dana BOS di tingkat sekolah, di antara hal-hal lain. Untuk menjamin akuntabilitas, pendanaan pendidikan dan dana yang dikelola oleh madrasah dan sekolah harus transparan. Kredibilitas lembaga pendidikan akan meningkat jika hal ini dapat dijelaskan. Studi ini serupa karena membahas manajemen pembiayaan pendidikan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penulis yang lebih pada manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing, Kabupaten Tanah Datar, dan kurang pada manajemen pembiayaan pendidikan (analisis konsep dan implikasinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan).
4. Menurut penelitian Vita Andini Yulicha (2018) berjudul “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Yayasan Sekolah Bakong Pittaya, Pattani, Thailand Selatan,” temuan penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembiayaan di Sekolah Bakong Pittaya berlangsung antara awal April hingga Juni. Selama tiga bulan tersebut, Sekolah Bakong Pittaya mengadakan pertemuan dengan dewan yayasan dan guru, setelah itu dewan yayasan menyetujui pertemuan tersebut dan menyerahkannya kepada pemerintah Thailand. Setelah disetujui, pemerintah menyalurkan dana sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Metode pengeluaran keuangan Sekolah Bakong Pittaya meliputi 1,4 juta THB dana pemerintah untuk semua biaya operasional dan 1,2 juta THB yang dialokasikan untuk gaji staf dan guru. Pada awal dan akhir setiap semester, dinas pendidikan

setempat melakukan prosedur pengawasan. Manajer utama sekolah melakukan pemantauan ad hoc di dalam sekolah. Setiap bulan Maret, Sekolah Bakong Pittaya menyerahkan laporan komprehensif yang mencakup bukti penerimaan dan pengeluaran sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban keuangan. Ketika dana dari pemerintah kerajaan tidak mencukupi untuk membiayai semua program, Sekolah Bakong Pittaya mengalami kesulitan keuangan. Studi ini serupa karena membahas keuangan pendidikan dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian yang disebutkan di atas lebih fokus pada administrasi pembiayaan pendidikan di Yayasan Sekolah Bakong Pittaya di Pattani, Thailand Selatan, sementara penulis lebih berfokus pada pengelolaan dana pendidikan di MTsS Balimbing, Kabupaten Tanah Datar.

5. Menurut temuan studi “Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Islam Al-Mawaddah Kudus” yang dilakukan oleh Zahrotul Mu'anisus Sa'adah pada tahun 2022, kegiatan pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan uang (pendapatan) yang diterima dan bagaimana uang tersebut digunakan dengan baik. Karena merupakan landasan praktik pendidikan dan mempengaruhi relevansi akademik, iklim akademik, serta inovasi dalam pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pendidikan. Dana pendidikan di Madrasah Al-Mawaddah Kudus, salah satu madrasah yang menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan, berasal dari beberapa proyek. Bendahara dan pengurus asrama bertanggung jawab atas administrasi dana pendidikan. Sumber pendanaan pendidikan meliputi iuran siswa (SPP), pemerintah, dan sumbangan sukarela dari masyarakat, serta proyek-proyek mandiri. Berdasarkan temuan studi, kegiatan berikut juga dilakukan oleh Panti Asuhan Al-Mawaddah Kudus: 1) akuntansi; 2) audit; dan 3) anggaran. Salah satu aspek penting dari keunggulan suatu lembaga pendidikan adalah pendanaannya. Penggunaan metodologi penelitian kualitatif adalah hal yang membedakan studi ini dengan studi sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian sebelumnya mengkaji pengelolaan

pendanaan pendidikan di Panti Asuhan Al-Mawaddah Kudus, sementara studi ini fokus pada administrasi pendanaan pendidikan di MTsS Balimbing.

6. Menurut temuan studi berjudul “Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Pendidikan” oleh Muhajir, N. M. N., Bachtiar, M., & Fauzi, A. (2023), manajemen keuangan dalam pendidikan sangat penting untuk kesuksesan dan kelancaran proses pendidikan. Penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan efisien dijamin oleh pengelolaan keuangan yang baik, yang akan meningkatkan standar pendidikan. Sekolah juga dapat mengendalikan risiko keuangan seperti pengeluaran tak terduga atau kekurangan dana dengan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan dalam pendidikan sama pentingnya untuk memastikan setiap siswa memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan. Semua anak dapat memiliki akses yang adil dan setara ke pendidikan berkualitas tinggi jika sekolah menerapkan manajemen keuangan yang baik. Singkatnya, manajemen keuangan yang efektif dalam pendidikan sangat penting bagi akses yang adil ke pendidikan dan efektivitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan manajemen keuangan yang kompeten dan efisien. Selain meningkatkan tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, penelitian ini menyarankan agar pemerintah dan lembaga pendidikan mengevaluasi dan meningkatkan sistem manajemen keuangan yang ada. Penelitian ini memiliki kesamaan karena membahas keuangan pendidikan, yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran pendidikan, dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Meskipun penulis di atas membahas pentingnya pengelolaan keuangan dalam pendidikan, peneliti dalam studi ini lebih fokus pada pengelolaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing, Kabupaten Tanah Datar.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, salah satu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap suatu fenomena tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai fenomena yang terjadi terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2020) Metode Fenomenologi merupakan metode kualitatif yang mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Tujuan dari studi fenomenologi ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan pengalaman hidup, khususnya yang dialami oleh seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan.

Pada proses pengumpulan data digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang dikumpulkan dari informan kunci lebih akurat dan valid karena sesuai dengan fenomena yang dialami secara langsung. Fenomenologi memiliki tujuan untuk mengetahui permasalahan atau fenomena yang terjadi dari sudut pandang seseorang yang mengalaminya secara langsung atau yang berhubungan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang melekat padanya.

Menurut Rukin, (2021:10) penelitian kualitatif merupakan jenis riset yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian menjadi sorotan utama, serta penggunaan landasan teori dimanfaatkan untuk memastikan fokus penelitian selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, landasan teori juga berperan dalam memberikan gambaran umum mengenai latar belakang penelitian serta menjadi acuan dalam pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar, khususnya mengenai Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, penulis akan mengumpulkan data dan mengungkapkan masalah yang terjadi dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk menghasilkan tujuan yang akan dicapai.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Balimbing Jl. Raya Batusangkar-Ombilin Km. 10, Kel. Balimbing, Kec. Rambatan, Kab. Tanah Datar-Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari Februari-Agustus 2025.

Tabel 3. 1  
Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Bulan						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt
1	Observasi Awal	√						
2	Penyusunan Proposal		√					
3	Bimbingan Proposal			√	√	√		
4	Seminar Proposal					√		
5	Perbaikan Setelah Seminar					√		
6	Penelitian					√	√	
7	Bimbingan Skripsi						√	
8	Sidang Munaqasah							√

#### C. Instrumen Penelitian

Menurut Ardiansyah dan rekan-rekannya (2023), instrumen penelitian mencakup berbagai alat seperti kuesioner, wawancara, panduan observasi, serta dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan

menganalisis data yang diperoleh dari partisipan penelitian. Selanjutnya, Nurhidayah (2024) menjelaskan bahwa instrumen merupakan perangkat yang dipakai untuk mengukur variabel atau objek yang diteliti, baik dalam pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Sementara itu, Pendas (2023) mengklasifikasikan instrumen menjadi dua jenis utama, yaitu instrumen tes dan non-tes, yang masing-masing berperan dalam pengumpulan data primer sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “*divalidasi*” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan penelitian untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar.

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk penulis saat akan mengumpulkan data. Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya, yang akan menjadi instrumen atau alat penelitian ini adalah penulis itu sendiri. Kemudian penulis akan dipandu dengan pedoman wawancara yang disiapkan sesuai dengan fokus penelitian dan daftar dokumentasi yang akan di-hunting di lokasi penelitian. Guna menjaga otensitas data penelitian, penulis akan dibantu dengan alat perekam audio, kamera (bisa diwakili dengan handphone), dan catatan lapangan.

#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan penjelasan dari mana data tersebut didapatkan. Adapun sumber informasi yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi yaitu :

##### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, survei, dan penyebaran kuesioner. Data ini bersifat orisinal, spesifik sesuai kebutuhan penelitian, dan dikumpulkan secara langsung tanpa perantara sehingga memiliki tingkat validitas dan keakuratan yang tinggi. Pengumpulan data primer biasanya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar dibanding data sekunder karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan aktual (Ardiansyah et al., 2023)

Dalam penelitian ini data penelitian ini data primer yang termasuk didalam pengumpulan data atau informasi yaitu Kepala Madrasah, Wakil Kesiswaan, Pembina, Guru, Siswa dan juga masyarakat setempat yang mana subjek penelitian tersebut dapat memberikan pelayanan terhadap lingkungan sekitar madrasah dan juga subjek penelitian itu sendiri.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, seperti dokumen, arsip, buku, jurnal, laporan, dan data historis yang sudah tersimpan dalam bentuk dokumenter. Data ini bukan dikumpulkan langsung dari objek atau subjek penelitian, melainkan berasal dari pihak ketiga atau hasil pengolahan data primer oleh peneliti lain atau lembaga resmi. Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer dan biasanya lebih mudah diakses serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Namun, peneliti harus memastikan relevansi, keakuratan, dan keabsahan data sekunder agar hasil penelitian tetap valid (Arvyanda, 2023; Undari Sulung

& Muspawi, 2024).. Informasi dikumpulkan dari sumber terkait, termasuk teks, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data terhadap penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena, perilaku, atau aktivitas dalam konteks alami untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan akurat mengenai objek penelitian. Observasi memungkinkan peneliti mendapatkan data primer secara real-time tanpa bergantung pada laporan pihak lain, sehingga menghasilkan gambaran yang holistik dan kontekstual (Nasution dalam Sugiyono, 2020). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang terkait dengan Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara mendapatkan suatu informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden atau partisipan yang mengetahui dan ahli dibidang yang akan di teliti. wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab.

Wawancara merupakan alat yang pada umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Dimana dalam wawancara ini seorang penulis akan mendapatkan data yang lebih mendalam dari informan yang dilakukan penulis melalui tanya jawab secara lisan dan tatap muka dengan satu arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara ini juga termasuk semi terstruktur, hal ini disebabkan penulis bisa bebas menanyakan lebih

mendalam dan lebih luas tentang topik pembahasan yang penulis lakukan sehingga mendapatkan data yang lebih kompleks. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu bersama Kepala Madrasah, Wakil Kesiswaan, Pembina, Siswa dan juga masyarakat setempat yang berada di sekitar lingkungan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:124) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar/foto atau karya-karya monumental dari seseorang/instansi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa data tertulis, gambar, rekaman, laporan, arsip, peraturan, catatan sejarah, dan sebagainya, baik yang bersifat formal maupun informal, serta berbentuk cetak maupun digital.

### F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya

(*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

## 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data adalah proses memilih dan membuang hal yang tidak penting untuk mendalami fokus penelitian dan mengorganisasikan data sedemikian rupa dan menarik kesimpulan akhir dari verifikasi.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data adalah proses mengelompokkan informasi dalam bentuk yang terstruktur, dan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta mengambil langkah-langkah tindak lanjut.

## 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan ini

merupakan suatu hasil dari analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan.

#### G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan dan kredibilitas merupakan dua aspek penting dalam penelitian. Triangulasi merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kedua aspek tersebut. Dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, peneliti dapat memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya valid, tetapi juga dapat dipercaya oleh peneliti lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Hardani, (2020:154) yang mengatakan bahwa triangulasi dapat diartikan sebagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada.

Keabsahan dan kredibilitas data ini penulis akan menggunakan triangulasi teknik. Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melibatkan berbagai sumber data, penulis berupaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat sidiq dan miftahul yang mengatakan bahwa Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk menguji konsistensi data dari berbagai sudut pandang, dari penggabungan teknik pengumpulan data sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan Penelitian

Hasil temuan yang diperoleh dari proses penelitian lapangan terkait manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar. Temuan disusun berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Kepala Madrasah, Bendahara, Wakil Sarpras, guru dan orang tua siswa. Penyajian temuan ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai bagaimana praktik manajemen pembiayaan diterapkan di MTsS Balimbing, serta mengungkap berbagai dinamika yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana pendidikan di lingkungan madrasah tersebut.

#### 1. Temuan Umum

Temuan umum berisi gambaran secara menyeluruh mengenai lingkungan MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

##### a. Identitas Sekolah

Tabel 4. 1  
Profil sekolah MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar

Nama Sekolah	:	MTsS Balimbing (Madrasah Tsanawiyah Swasta Balimbing)
Alamat	:	Jalan Raya Batusangkar–Ombilin Km 10, Jorong Balimbing, Nagari Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
Status Sekolah	:	Sekolah swasta tingkat Madrasah Tsanawiyah di bawah Kementerian Agama (Kemenag)
Akreditasi	:	B (SK Akreditasi 1044/BAP-SM/LL/X/2016, masa berlaku hingga 2026)
Didirikan	:	SK pendirian tanggal 15 Januari 2004, mulai beroperasi tahun 2004

MTsS Balimbing merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tingkat menengah pertama yang berada di bawah naungan

Kementerian Agama, berlokasi di Jl. Raya Batusangkar-Ombilin Km. 10, Kelurahan Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Madrasah ini didirikan sebagai upaya untuk memberikan layanan pendidikan berbasis keislaman yang terpadu, dengan menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan. MTsS Balimbing memiliki visi untuk mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu bersaing secara akademik dan spiritual di tengah dinamika masyarakat modern. Secara kelembagaan, madrasah ini dikelola secara swasta dengan dukungan dana dari berbagai sumber, antara lain dana BOS, infaq masyarakat, kegiatan amal, serta bantuan dari pemerintah daerah dan pihak legislatif. Dalam operasionalnya, MTsS Balimbing didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup profesional, serta memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan program pendidikan dan keagamaan secara optimal. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga diselenggarakan untuk mendukung pengembangan karakter dan potensi siswa di luar pembelajaran formal.

b. Sejarah MTsS Balimbing

MTsS Balimbing resmi berdiri pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai beroperasi di tahun yang sama, berdasarkan SK Pendirian kd.03.04/4/PP.00/07/2004. SK operasional terakhir dikeluarkan pada 25 Agustus 2020. Secara historis, MTsS Balimbing didirikan atas inisiatif tokoh masyarakat dan ulama setempat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pentingnya pendidikan agama Islam di tengah masyarakat. Pada awal berdirinya, madrasah ini beroperasi dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, serta jumlah peserta didik dan tenaga pengajar yang masih minim. Namun, berkat semangat gotong royong dan dukungan penuh dari masyarakat sekitar, madrasah ini perlahan berkembang dan mulai mendapatkan kepercayaan publik. Dalam perjalanannya, MTsS Balimbing mengalami beberapa fase penting, termasuk pengakuan formal dari Kementerian Agama, penambahan

ruang kelas, serta pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dukungan dari pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan turut menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi dan perkembangan madrasah ini hingga saat ini. MTsS Balimbing kini tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di wilayah Balimbing dan sekitarnya.

### c. Visi dan Misi MTsS Balimbing

#### 1) Visi

“Islami, cerdas, terampil, profesional, berbudaya dan berwawasan lingkungan.”

Adapun Indikator visi meliputi:

- a). Keyakinan agama Islam teguh dan diterapkan konsekuen
- b). Lulusan mampu bersaing masuk MA/SLTA favorit di Kabupaten/Provinsi
- c). Keterampilan akademik dan non-akademik sesuai bakat minat
- d). Tenaga pendidik profesional
- e). Menjadi teladan bagi masyarakat
- f). Lingkungan madrasah yang hijau, bersih, sehat, nyaman

#### 2) Misi

- a). Menciptakan suasana pendidikan berkarakter Islami
- b). Menanamkan prinsip belajar sebagai ibadah
- c). Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik & kependidikan
- d). Membudayakan peserta didik berpikir cerdas dan profesional
- e). Mengembangkan potensi peserta didik melalui ekstrakurikuler
- f). Membekali peserta didik agar siap diterima di MA/SLTA favorit

MTsS Balimbing memiliki visi utama yaitu “Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, berakhlakul karimah, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.” Visi ini mencerminkan tekad madrasah untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki

karakter moral dan spiritual yang kuat. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, madrasah menetapkan sejumlah misi strategis. Pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik. Kedua, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui pembinaan keagamaan yang konsisten dan terarah. Ketiga, meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan profesional secara berkelanjutan. Keempat, menjalin kemitraan dengan masyarakat, orang tua, dan berbagai pihak terkait guna mendukung keberlangsungan program pendidikan. Kelima, menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan visi dan misi tersebut, MTsS Balimbing berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam membentuk generasi yang unggul, religius, dan siap menghadapi tantangan zaman.

d. Data Guru MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar

Tabel 4. 2  
Data Guru MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar

No	Nama	Jabatan
1	Arwin, S. Pd. I, M. Pd.	Kepala Madrasah
2	M. Peto Alam, A. Md.	Komite
3	Yelli Zabet, S. H.	Kepala TU
4	Hamdanil, S. Pd.	Waka Kurikulum dan Sarpras
5	Nazmi, S. Ag.	Waka Kesiswaan
6	Weri Fitria, S. Pd.	Bendahara
7	Meria Gusti, S. Pd.	Staf TU
8	Junaidi, S. Ag.	Guru
9	Ida Suryani, S. Pd.	Guru
10	Rahmah SR, Ssn.	Guru
11	Syamsinar Rahma Y, S. E.	Guru
12	Randi Kurnia, S. Pd.	Guru

13	Eka Mardia Nengsih, S. Pd.	Guru
14	Jenti Helma, S. Ag.	Guru
15	Syahrul Hamid, S. Pd.	Guru
16	Zulfitri, S. Pd.	Guru
17	Wiwit Sulastri, S. Pd.	Guru
18	Meidiana Harisanti, S. Pd. I.	Guru
19	Zulmi Dewita, S. Pd.	Guru
20	Darwati, S. Pd.	Guru
21	Elva Yeni, S. Pd.	Guru

## 2. Temuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar, dengan fokus utama pada dua sub-variabel penting, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Penekanan pada kedua aspek ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana proses penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif, sistematis, dan berbasis kebutuhan nyata madrasah, serta bagaimana implementasinya dijalankan dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan lembaga. Untuk memperoleh data yang kaya dan kontekstual, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan madrasah, di antaranya kepala madrasah, bendahara, guru, wakil bidang sarana dan prasarana, serta perwakilan orang tua siswa. Keberagaman informan ini memungkinkan peneliti untuk melihat praktik manajemen pembiayaan dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek kebijakan internal maupun respons dan partisipasi eksternal. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta strategi yang digunakan oleh pihak madrasah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien demi mendukung mutu pendidikan.

Adapun hasil penelitian yang di uraikan berdasarkan fokus penelitian yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar.

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan madrasah. Proses perencanaan ini umumnya diawali dengan identifikasi kebutuhan madrasah melalui rapat internal yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana, serta perwakilan komite dan orang tua siswa. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas lembaga. Komponen pembiayaan yang dirancang dalam rencana anggaran meliputi beberapa aspek penting, antara lain biaya operasional rutin madrasah, seperti gaji guru honorer, listrik, air, dan alat tulis kantor; pembiayaan kegiatan pembelajaran, termasuk pelatihan guru dan pembelian bahan ajar; pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sanitasi; serta alokasi dana untuk program pengembangan peserta didik, seperti kegiatan ekstrakurikuler, lomba akademik, dan keagamaan. Perencanaan ini dituangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) yang disusun setiap tahun dan dijadikan acuan dalam proses implementasi pembiayaan. Dengan perencanaan yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak, madrasah berupaya menjaga akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas dalam penggunaan dana demi mendukung pencapaian tujuan pendidikan..

Kepala madrasah menyampaikan bahwa perencanaan pembiayaan disusun dengan mengacu pada kebutuhan madrasah dan ketersediaan dana. Adapun sumber keuangan utama berasal dari dana

BOS dan sumbangan masyarakat. Dalam wawancara, kepala madrasah menyatakan:

*"Dana BOS merupakan sumber utama. Untuk penambahan dana, kami melakukan penggalangan sumbangan, seperti kotak infak Jumat, proposal kegiatan, dan turba siswa ke masjid-masjid yang telah diberikan surat izin dari pengawas. Semua dikoordinasi oleh guru yang ditunjuk." (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)*

Bendahara madrasah juga menambahkan bahwa penyusunan anggaran dilakukan setiap tahun dan dievaluasi secara berkala:

*"Biasanya siklus perencanaan dimulai awal tahun ajaran, lalu disesuaikan di tengah semester dan akhir tahun. Kami libatkan kepala sekolah, komite, dan guru dalam penyusunan RKAM." (Wawancara dengan Bendahara, 15 Juli 2025)*

Wakil sarana dan prasarana juga menjelaskan bahwa perencanaan pembiayaan untuk fasilitas dimulai awal semester, pertengahan semester, dan akhir tahun:

*"Untuk pengadaan dan pemeliharaan gedung, kami menggunakan dana BOS. Namun bila kurang, kami ajukan proposal atau mencari bantuan dari alumni dan donatur." (Wawancara dengan Wakil Sarpras, 15 Juli 2025)*

Orang tua siswa mengungkapkan bahwa mereka belum pernah memberikan kontribusi dana langsung karena sekolah gratis. Namun jika diperlukan, mereka terlibat dalam gotong royong:

*"Kami tidak diminta biaya, tapi kalau ada pembangunan, biasanya gotong royong, seperti membersihkan atau bantu beli bahan bangunan." (Wawancara dengan Orang Tua, 15 Juli 2025)*

Perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan fondasi awal dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan. Di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar, proses ini dilakukan secara bertahap, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan aktual madrasah. Hasil wawancara dengan kepala madrasah menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tahunan disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan yang berkembang, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kondisi riil madrasah. Kepala madrasah menegaskan bahwa sumber keuangan

utama berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sumbangan masyarakat, seperti melalui kotak infak Jumat, proposal kegiatan, serta kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan siswa (turba) ke masjid-masjid dengan izin pengawas madrasah. Pernyataan beliau sebagai berikut:

*“Dana BOS merupakan sumber utama. Untuk penambahan dana, kami melakukan penggalangan sumbangan, seperti kotak infak Jumat, proposal kegiatan, dan turba siswa ke masjid-masjid yang telah diberikan surat izin dari pengawas. Semua dikoordinasi oleh guru yang ditunjuk.”* (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)

Praktik ini menunjukkan adanya integrasi antara manajemen sekolah dan partisipasi sosial-keagamaan, yang mencerminkan pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach) dalam pembiayaan pendidikan, sebagaimana dianjurkan oleh UNESCO (2005). Strategi ini juga memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi sebagai bagian dari good governance dalam pendidikan.

Lebih lanjut, bendahara madrasah menyampaikan bahwa perencanaan anggaran dilakukan setiap tahun ajaran, dengan proses evaluasi berkala pada pertengahan dan akhir tahun. Rencana anggaran dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), yang melibatkan kepala madrasah, guru, serta komite sekolah dalam proses penyusunannya:

*“Biasanya siklus perencanaan dimulai awal tahun ajaran, lalu disesuaikan di tengah semester dan akhir tahun. Kami libatkan kepala sekolah, komite, dan guru dalam penyusunan RKAM.”* (Wawancara dengan Bendahara, 15 Juli 2025)

Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembiayaan di MTsS Balimbing tidak dilakukan secara top-down, melainkan berbasis musyawarah dengan memperhatikan suara dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2010) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran adalah karakteristik dari manajemen pendidikan

yang partisipatif, yang dapat mendorong akuntabilitas dan legitimasi dalam pengelolaan keuangan pendidikan.

Adapun wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana menekankan bahwa perencanaan pembiayaan pada aspek fisik dan infrastruktur pendidikan dilakukan secara berkala. Dana BOS digunakan sebagai sumber utama untuk pengadaan dan pemeliharaan, namun ketika dana tidak mencukupi, pihak madrasah menyusun proposal permohonan bantuan ke alumni dan donatur:

*“Untuk pengadaan dan pemeliharaan gedung, kami menggunakan dana BOS. Namun bila kurang, kami ajukan proposal atau mencari bantuan dari alumni dan donatur.”* (Wawancara dengan Wakil Sarpras, 15 Juli 2025)

Dari sini terlihat bahwa manajemen pembiayaan di MTsS Balimbing adaptif terhadap kondisi keuangan dan terbuka terhadap sumber-sumber alternatif, yang sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Rusdiana (2022), bahwa manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif adalah yang mampu mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber dana—baik formal maupun nonformal—untuk menjamin kontinuitas program pendidikan.

Menariknya, dari sisi masyarakat, dalam hal ini orang tua siswa, tidak ada pungutan dana rutin atau kontribusi berbentuk uang. Namun demikian, bentuk partisipasi diwujudkan dalam kegiatan gotong royong, seperti membantu pembangunan atau perbaikan sarana. Salah satu orang tua menyampaikan:

*“Kami tidak diminta biaya, tapi kalau ada pembangunan, biasanya gotong royong, seperti membersihkan atau bantu beli bahan bangunan.”* (Wawancara dengan Orang Tua, 15 Juli 2025)

Model kontribusi ini mencerminkan prinsip pendidikan berbasis nilai lokal dan partisipasi komunitas. Dalam hal ini, perencanaan pembiayaan tidak hanya memperhitungkan alokasi dana dalam bentuk finansial, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi non-moneter dari masyarakat, seperti tenaga dan material, yang menjadi

bagian dari sumber daya pembiayaan yang sah dan produktif (Zulkarmain, 2020).

Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep manajemen pendidikan yang dikemukakan oleh George R. Terry, yakni bahwa manajemen pendidikan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, perencanaan pembiayaan di MTsS Balimbing menjadi bagian integral dari strategi jangka pendek dan jangka menengah untuk mendukung keberlanjutan kegiatan belajar mengajar dan pengembangan kelembagaan.

Dari sisi siklus manajerial, praktik di MTsS Balimbing sesuai dengan siklus manajemen pembiayaan pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Rusdiana (2022), yang terdiri dari lima tahap: perencanaan anggaran (budgeting), penggalan sumber dana, pelaksanaan dan distribusi dana, pengawasan, serta pelaporan. Dalam tahap perencanaan, terlihat bahwa madrasah mengacu pada kebutuhan aktual (need-based budgeting) dan memperhitungkan keterbatasan serta potensi dukungan dari luar madrasah.

Penelitian ini juga menguatkan temuan Abdullah Adzka (2022) yang meneliti manajemen pembiayaan pendidikan di SMP IT Rahmatan Lil Alamin, di mana perencanaan pembiayaan yang partisipatif dan adaptif berdampak pada peningkatan mutu lulusan melalui pemenuhan kebutuhan kegiatan pembelajaran. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran dan diversifikasi sumber dana untuk menjamin keberlanjutan program.

Sementara itu, penelitian oleh Zahrotul Mu'anis Sa'adah (2022) pada Madrasah Al-Mawaddah Kudus menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan pendidikan ditentukan oleh keberadaan tim keuangan yang terorganisir dan penggunaan dana yang

akuntabel. MTsS Balimbing, meskipun tidak memungut iuran tetap dari siswa, mampu membangun sistem pembiayaan yang kolaboratif, yang menjadikan perencanaan bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi juga sebagai strategi sosial yang membangun kepercayaan dan kolaborasi lintas aktor.

Lebih lanjut, teori pembiayaan pendidikan menurut Nursobah (2022) menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup seluruh proses pengalokasian sumber daya untuk kegiatan operasional lembaga pendidikan secara efisien dan terencana. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa MTsS Balimbing telah menerapkan pendekatan tersebut melalui perencanaan tahunan, pengumpulan kebutuhan unit, penyesuaian dengan dana BOS, serta pembentukan jaringan pendukung dari masyarakat.

Namun demikian, kendala tetap ada, terutama terkait ketergantungan terhadap dana BOS yang relatif terbatas, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun anggaran secara profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola keuangan madrasah, seperti pelatihan bendahara dalam manajemen RKAM dan penggunaan teknologi seperti ARKAS, menjadi kebutuhan penting sebagaimana ditegaskan oleh Kamaruddin et al. (2022) dalam kajian mereka tentang penguatan kapasitas manajerial lembaga pendidikan.

Dari sudut pandang teoritis dan empiris, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan di MTsS Balimbing berada dalam jalur yang sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan modern-partisipatif, adaptif, transparan, dan berorientasi kebutuhan. Namun untuk menjamin keberlanjutan sistem ini, dibutuhkan dukungan kebijakan dan pelatihan yang memadai agar sumber daya manusia di madrasah mampu menjalankan fungsi perencanaan secara optimal dan visioner.

#### b. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar menerapkan prinsip transparansi, tanggung

jawab, dan efisiensi sebagai landasan utama dalam pengelolaan keuangan madrasah. Pelaksanaan pembiayaan dilakukan berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), yang sebelumnya dibahas dan disepakati bersama oleh tim manajemen, guru, dan komite. Kepala madrasah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam memastikan seluruh kegiatan pembiayaan berjalan sesuai prosedur, sedangkan bendahara madrasah bertugas mencatat, menyalurkan, dan melaporkan penggunaan dana dengan akuntabilitas yang tinggi. Wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana turut terlibat dalam memastikan bahwa alokasi dana untuk fasilitas fisik digunakan tepat sasaran, baik untuk pemeliharaan rutin maupun pengembangan infrastruktur.

Pelaksanaan dana dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan waktu kegiatan dan kebutuhan aktual madrasah. Seluruh pengeluaran tercatat secara sistematis dan didukung dengan bukti transaksi yang sah, seperti kuitansi, faktur, dan laporan keuangan periodik. Pihak madrasah juga mengedepankan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, khususnya dalam rapat evaluasi keuangan yang rutin digelar bersama komite dan perwakilan orang tua siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan tidak hanya menjalankan aspek administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap manajemen keuangan lembaga.

Praktik ini selaras dengan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Rusdiana (2022), bahwa institusi pendidikan harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan pengeluaran secara terbuka dan sistematis. Selain itu, hal ini juga mencerminkan pelaksanaan fungsi “actuating” dan “controlling” dalam manajemen menurut George R. Terry, yaitu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan agar selaras dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan yang terstruktur dan berintegritas,

MTsS Balimbing menunjukkan komitmennya dalam mengelola dana pendidikan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk amanah kolektif dalam mendukung mutu dan keberlangsungan pendidikan.

Kepala madrasah menjelaskan bahwa pelaksanaan didasarkan pada perencanaan awal dan dimonitor secara langsung oleh tim yang ditunjuk:

*"Pelaksanaan dana selalu disesuaikan dengan RKAM. Ada monitoring dari kepala madrasah dan wakil, terutama dalam pengadaan barang atau perbaikan gedung." (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)*

Wakil sarana dan prasarana menyampaikan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran:

*"Masalah utama itu dana. Kadang rencana sudah ada, tapi dana BOS belum cukup. Jadi kami cari donatur atau masyarakat setempat." (Wawancara dengan Wakil Sarpras, 15 Juli 2025)*

Untuk pembangunan fisik, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Kepala madrasah menjelaskan bahwa mereka mengelola bantuan pembangunan melalui panitia yang ditunjuk:

*"Kami bentuk panitia dari komite dan guru. Kalau masyarakat ingin bantu, kami arahkan agar langsung membeli bahan ke toko bangunan untuk menghindari salah paham soal dana." (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)*

Orang tua juga mengetahui penggunaan dana melalui rapat bersama:

*"Sekolah biasanya adakan rapat, dan dijelaskan ke kami tentang rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan." (Wawancara dengan Orang Tua, 15 Juli 2025)*

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing merupakan tahap lanjutan dari proses perencanaan anggaran yang sebelumnya telah dirancang secara kolektif dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dalam pelaksanaannya, MTsS Balimbing mengacu pada prinsip-prinsip manajemen pendidikan

modern, khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana.

Kepala madrasah menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran pendidikan dilakukan secara sistematis dan terkontrol melalui mekanisme pengawasan internal. Segala bentuk pengeluaran atau realisasi anggaran mengacu pada RKAM yang telah disusun sebelumnya. Kepala madrasah bersama tim yang ditunjuk melakukan monitoring secara langsung, terutama terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur:

*“Pelaksanaan dana selalu disesuaikan dengan RKAM. Ada monitoring dari kepala madrasah dan wakil, terutama dalam pengadaan barang atau perbaikan gedung.”* (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan di madrasah tidak dijalankan secara serampangan, melainkan melalui kontrol administratif yang sistematis. Kepala madrasah tidak hanya berfungsi sebagai penanggung jawab tertinggi, tetapi juga sebagai pengendali utama terhadap arus dana yang keluar masuk, termasuk pelaksanaan pembangunan dan pengadaan.

Secara teoretis, ini mencerminkan peran penting manajemen dalam fungsi *actuating* dan *controlling* sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (dalam Kurniawan, 2021), yaitu bagaimana pemimpin pendidikan menjalankan, mengarahkan, serta mengendalikan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Dalam konteks ini, kepala madrasah berperan sebagai manajer yang memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan rencana dan berjalan secara akuntabel.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pembiayaan pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah bidang Sarana dan Prasarana, ditemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan adalah keterbatasan anggaran,

terutama ketika dana BOS yang diandalkan tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh rencana kegiatan:

“Masalah utama itu dana. Kadang rencana sudah ada, tapi dana BOS belum cukup. Jadi kami cari donatur atau masyarakat setempat.” (Wawancara dengan Wakil Sarpras, 15 Juli 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa MTsS Balimbing menghadapi situasi yang lazim dihadapi oleh banyak lembaga pendidikan swasta: ketergantungan pada satu sumber dana (dalam hal ini BOS) membuat pelaksanaan program terhambat saat alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Strategi yang diambil madrasah, yaitu mencari donatur atau menggalang bantuan masyarakat, mencerminkan bentuk inovasi pembiayaan yang berbasis komunitas.

Kondisi ini mendukung teori pembiayaan pendidikan dari Nursobah (2022), yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan dalam pendidikan tidak cukup hanya bergantung pada satu sumber, tetapi harus memanfaatkan berbagai potensi eksternal, seperti partisipasi masyarakat, alumni, dan lembaga mitra. Pendekatan ini sering disebut sebagai *community-based school financing*, yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan melalui jejaring sosial lokal.

Lebih lanjut, kepala madrasah juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan fisik seperti pembangunan ruang kelas atau perbaikan gedung, madrasah membentuk panitia khusus yang terdiri dari komite, guru, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan dana sumbangan:

*“Kami bentuk panitia dari komite dan guru. Kalau masyarakat ingin bantu, kami arahkan agar langsung membeli bahan ke toko bangunan untuk menghindari salah paham soal dana.”* (Wawancara dengan Kepala Madrasah, 15 Juli 2025)

Strategi ini memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan sosial secara informal yang sangat kuat. Madrasah tidak hanya membuka ruang kontribusi, tetapi juga mengatur mekanismenya agar

tetap kredibel dan terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip *transparency* dan *accountability* dalam teori *good governance* (UNESCO, 2005), yang menyebutkan bahwa lembaga pendidikan harus mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai bentuk legitimasi sosial.

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan tidak hanya terbatas pada bentuk dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa, diketahui bahwa bentuk kontribusi yang sering diberikan adalah melalui tenaga dan partisipasi dalam kegiatan gotong royong:

*“Sekolah biasanya adakan rapat, dan dijelaskan ke kami tentang rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan.”* (Wawancara dengan Orang Tua, 15 Juli 2025)

Rapat ini menjadi sarana komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua dalam menyampaikan laporan pelaksanaan keuangan dan program kerja. Pola partisipasi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun madrasah tidak memungut iuran pendidikan, masyarakat tetap terlibat dalam pembiayaan secara non-finansial. Ini menunjukkan bentuk konkret dari *in-kind contribution* atau kontribusi berbasis material dan tenaga kerja, yang merupakan bagian dari sistem pembiayaan partisipatif.

Penelitian relevan yang memperkuat temuan ini adalah studi oleh Zahrotul Mu’anisus Sa’adah (2022) di Madrasah Al-Mawaddah Kudus, yang menemukan bahwa keterbatasan dana formal mendorong madrasah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan alumni melalui partisipasi sosial dan material. Persamaan dengan MTsS Balimbing terletak pada pengelolaan yang kolaboratif dan berbasis nilai lokal, sementara perbedaannya ada pada skema kontribusi yang lebih terstruktur di MTsS Balimbing melalui pembentukan panitia khusus dan rapat pertanggungjawaban publik.

Dari sisi teori manajemen pembiayaan, Rusdiana (2022) menyebut bahwa pelaksanaan pembiayaan harus memenuhi tiga prinsip utama: relevansi (kesesuaian antara dana yang digunakan dan kebutuhan pendidikan), efisiensi (penggunaan dana seminimal mungkin untuk hasil maksimal), dan efektivitas (dampak penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan). Ketiga prinsip ini tercermin dalam pelaksanaan keuangan MTsS Balimbing.

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing, terdapat beberapa strategi utama yang secara nyata diterapkan oleh pihak madrasah untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pertama, pelaksanaan kegiatan pendidikan selalu disesuaikan dengan ketersediaan dana secara real-time. Artinya, program-program yang direncanakan hanya dijalankan apabila dana telah tersedia dan dipastikan cukup, sehingga menghindari defisit anggaran atau ketergantungan pada utang internal. Kedua, madrasah secara aktif mengoptimalkan sumber daya sosial melalui partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk dukungan material, tenaga, maupun sumbangan sukarela. Pendekatan ini memungkinkan madrasah untuk tetap menjalankan program yang bersifat mendesak, meskipun dana dari pemerintah belum mencukupi. Ketiga, pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan secara struktural, dengan melibatkan kepala madrasah, wakil kepala, dan bendahara sebagai tim pengendali utama. Pengawasan ini tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup pemantauan langsung terhadap kegiatan seperti pengadaan barang dan pembangunan fisik. Terakhir, keterlibatan masyarakat juga dijaga melalui mekanisme komunikasi terbuka, khususnya melalui forum-forum resmi seperti rapat bersama orang tua atau pertemuan komite madrasah. Melalui forum ini, pihak madrasah memberikan penjelasan tentang rencana kegiatan, penggunaan dana, serta progres pelaksanaan program, sehingga

menciptakan transparansi yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pendidikan.

Meskipun demikian, kendala klasik seperti keterlambatan pencairan dana BOS, minimnya pelatihan keuangan, dan belum digunakannya sistem digital seperti ARKAS, masih menjadi catatan penting. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan di MTsS Balimbing masih berada pada tahap transisi dari sistem manual ke sistem berbasis akuntabilitas digital. Ini diperkuat oleh pernyataan dalam dokumen bahwa “sistem pencatatan masih dilakukan secara manual dan menggunakan Excel karena belum menggunakan aplikasi khusus seperti ARKAS atau SIMDA”

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan pembiayaan, studi oleh Kamaruddin et al. (2022) menyarankan pentingnya penguatan kapasitas manajerial dan pelatihan literasi keuangan bagi kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola keuangan. Hal ini dapat menjadi rekomendasi penting bagi MTsS Balimbing ke depan, terutama dalam konteks perbaikan pelaksanaan dan pelaporan keuangan berbasis digital.

Sebagai kesimpulan dari temuan ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing mencerminkan kombinasi antara perencanaan berbasis kebutuhan dan implementasi berbasis kepercayaan. Meski keterbatasan dana menjadi tantangan dominan, strategi kolaboratif dengan masyarakat serta pengawasan yang dilakukan secara internal telah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pendidikan.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar, peneliti menyimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan di madrasah ini dijalankan melalui dua tahapan utama yang saling berkaitan,

yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Kedua tahapan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dari pihak madrasah untuk mengelola dana pendidikan secara bertanggung jawab dan adaptif, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sumber daya keuangan. Proses perencanaan tidak hanya melibatkan kepala madrasah dan bendahara, tetapi juga melibatkan guru, komite madrasah, dan perwakilan orang tua siswa, yang menunjukkan penerapan prinsip partisipatif dalam penyusunan anggaran. Sementara itu, tahap pelaksanaan didasarkan secara ketat pada rencana anggaran (RKAM) yang telah disusun, disertai pengawasan internal dan keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga maupun material. Kondisi ini mencerminkan sebuah sistem manajemen pembiayaan yang bersandar pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan berorientasi pada efisiensi penggunaan dana. Meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana BOS sebagai sumber utama pembiayaan, madrasah mampu mengembangkan strategi alternatif melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti penggalangan sumbangan, partisipasi gotong royong, dan pengajuan proposal kepada donatur. Temuan ini tidak hanya memperkuat relevansi teori manajemen pembiayaan pendidikan yang telah dikemukakan dalam kajian pustaka, tetapi juga memberikan gambaran nyata bahwa praktik manajemen pembiayaan yang efektif dapat diwujudkan bahkan dalam kondisi finansial yang terbatas, asalkan terdapat kemauan kolektif, kepemimpinan yang terbuka, serta sistem yang akuntabel. Berikut ini akan dipaparkan pembahasan secara lebih mendalam berdasarkan dua sub-variabel utama yang menjadi fokus penelitian ini, yakni perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

#### 1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara sistematis dan kolektif oleh unsur-unsur penting dalam manajemen madrasah, yaitu kepala madrasah, bendahara, serta wakil kepala madrasah termasuk wakil bidang sarana prasarana. Perencanaan ini tidak bersifat insidental, tetapi disusun secara

berkala dalam tiga fase penting selama satu tahun ajaran, yaitu pada awal semester, pertengahan semester, dan akhir tahun. Ketekunan dalam mengatur dan mengadaptasi perencanaan pembiayaan secara periodik ini mencerminkan karakter manajemen strategis yang proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan yang berkembang dan menyesuaikan alokasi anggaran dengan dinamika kegiatan pendidikan.

Komponen pembiayaan yang menjadi fokus utama dalam perencanaan meliputi pengadaan alat dan perlengkapan pendidikan, pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta perbaikan sarana penunjang pembelajaran. Dalam wawancara, kepala madrasah menyebutkan bahwa sumber utama dari pembiayaan adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, karena dana BOS tidak selalu mampu mencakup seluruh kebutuhan prioritas madrasah, perencanaan juga disusun dengan pendekatan terbuka terhadap potensi dukungan eksternal. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan internal berbasis kebutuhan (*need-based planning*) dan pendekatan eksternal berbasis potensi sosial (*community-supported planning*).

Adapun langkah-langkah didalam perencanaan pembiaayaan Pendidikan yaitu

a. Analisis Kebutuhan dan Tujuan Pendidikan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan tujuan pendidikan. Ini melibatkan penetapan tingkat pendidikan yang ingin dicapai (misalnya, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, atau pendidikan kejuruan), jenis institusi (negeri, swasta, internasional), dan spesialisasi atau program studi yang diminati. Analisis ini juga mencakup pertimbangan terkait kualitas pendidikan yang diinginkan, potensi beasiswa, dan kebutuhan khusus (misalnya, kursus tambahan, bimbingan belajar).

#### b. Estimasi Biaya Pendidikan

Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengestimasi total biaya pendidikan. Ini mencakup:

- 1). Biaya Langsung: Uang sekolah/kuliah, biaya pendaftaran, sumbangan pengembangan institusi, biaya prakti<sup>2</sup>).
- 2). Biaya Tidak Langsung: Buku, alat tulis, seragam, transportasi, akomodasi (jika di luar kota), makanan, dan biaya hidup sehari-hari.
- 3). Biaya Lain-lain: Kegiatan ekstrakurikuler, kursus tambahan, bimbingan belajar, dan keperluan pribadi.

Penting untuk mencari informasi biaya terbaru dari institusi pendidikan yang relevan dan mempertimbangkan potensi inflasi biaya pendidikan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa sumber daya online atau konsultan pendidikan juga dapat membantu dalam estimasi ini.

Penting untuk mencari informasi biaya terbaru dari institusi pendidikan yang relevan dan mempertimbangkan potensi inflasi biaya pendidikan yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa sumber daya online atau konsultan pendidikan juga dapat membantu dalam estimasi ini.

#### c. Evaluasi Sumber Pendanaan

Langkah ini melibatkan identifikasi dan evaluasi berbagai sumber pendanaan yang tersedia. Sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi:

- 1). Dana Pribadi/Keluarga: Tabungan, investasi, pendapatan rutin, atau aset yang dapat dicairkan.
- 2). Beasiswa: Beasiswa merit-based (berdasarkan prestasi), need-based (berdasarkan kebutuhan finansial), beasiswa pemerintah, swasta, atau institusi. Penting untuk aktif mencari informasi beasiswa sejak dini.

- 3). Pinjaman Pendidikan: Pinjaman bank, pinjaman pemerintah, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Pertimbangkan suku bunga, jangka waktu, dan persyaratan pengembalian.
- 4). Bantuan Keuangan Lainnya: Hibah, program kerja-studi, atau dana dari lembaga filantropi.

d. Penyusunan Rencana Keuangan

Setelah sumber pendanaan diidentifikasi, susunlah rencana keuangan yang komprehensif. Ini melibatkan:

- 1). Penetapan Target Tabungan: Menentukan jumlah yang perlu ditabung secara berkala untuk mencapai target biaya pendidikan.
- 2). Strategi Investasi: Jika memungkinkan, pertimbangkan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu investasi (misalnya, reksa dana pendidikan, obligasi, saham).
- 3). Manajemen Arus Kas: Membuat anggaran untuk pengeluaran bulanan dan memastikan ada sisa dana yang dapat dialokasikan untuk pendidikan.
- 4). Perencanaan Kontingensi: Mempersiapkan dana darurat untuk situasi tak terduga (misalnya, biaya medis, perubahan biaya pendidikan yang mendadak).

e. Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana

Langkah terakhir adalah melaksanakan rencana dan memantau perkembangannya secara berkala. Ini meliputi:

- 1). Disiplin Menabung/Berinvestasi: Konsisten dalam menyisihkan dana sesuai rencana.
- 2). Evaluasi Berkala: Tinjau kembali rencana keuangan setidaknya setahun sekali atau saat ada perubahan signifikan dalam kondisi finansial atau biaya pendidikan.

- 3). Penyesuaian Rencana: Bersiap untuk menyesuaikan rencana jika ada perubahan dalam estimasi biaya, ketersediaan dana, atau tujuan pendidikan.
- 4). Pencarian Peluang Baru: Tetap membuka diri terhadap peluang beasiswa atau bantuan keuangan baru yang mungkin muncul.

Praktik perencanaan ini sangat sejalan dengan pandangan Mulyasa (2004) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan fondasi awal dari keseluruhan manajemen pendidikan. Ia menekankan bahwa perencanaan harus disusun secara rasional, matang, dan berbasis data agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di MTsS Balimbing, kegiatan perencanaan dilakukan dalam forum musyawarah bersama yang melibatkan guru, bendahara, wakil kepala madrasah, dan komite. Proses ini memperlihatkan karakter manajemen partisipatif yang mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Arikunto (2010) menekankan bahwa perencanaan anggaran pendidikan yang baik menuntut adanya dialog antar pihak untuk membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap program-program sekolah. Partisipasi ini bukan hanya menjamin kesesuaian antara anggaran dan kebutuhan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun madrasah tidak memberlakukan pungutan pendidikan bagi siswa karena kebijakan sekolah gratis, masyarakat tetap dilibatkan dalam mendukung kegiatan pembiayaan melalui kontribusi non-finansial. Orang tua siswa, misalnya, terlibat dalam kegiatan gotong royong saat pembangunan ruang belajar atau perbaikan fasilitas sanitasi. Hal ini sesuai dengan pendekatan *Community-Based Management (CBM)* yang digagas UNESCO (2005), di mana masyarakat lokal menjadi aktor aktif dalam mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan melalui kontribusi berbasis sumber daya lokal, baik berupa tenaga, material, maupun jejaring sosial.

Strategi yang diterapkan MTsS Balimbing dalam merumuskan perencanaan keuangan juga mencerminkan konsep siklus manajemen pembiayaan pendidikan seperti yang dijelaskan Rusdiana (2022), yaitu dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, pelaksanaan anggaran, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam konteks MTsS Balimbing, tahap identifikasi kebutuhan dilakukan secara dialogis dalam forum internal; penyusunan rencana dituangkan dalam dokumen RKAM; pelaksanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan dana; pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dan tim pengelola; dan evaluasi dilakukan pada akhir tahun ajaran untuk menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak terdapat ketegangan antara manajemen internal dan masyarakat dalam penyusunan maupun pelaksanaan perencanaan anggaran. Sebaliknya, hubungan tersebut berlangsung secara harmonis karena adanya keterbukaan informasi dari pihak madrasah, serta kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap integritas pengelola. Hal ini berbanding lurus dengan prinsip good governance dalam pendidikan, yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penelitian ini memperkuat hasil studi sebelumnya oleh Zahrotul Mu'anisus Sa'adah (2022) di Madrasah Al-Mawaddah Kudus, yang menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan sistem pengelolaan berbasis kolaborasi. Meski berbeda konteks, keduanya menunjukkan bahwa keterlibatan guru dan masyarakat dalam perencanaan pembiayaan mampu menciptakan efisiensi anggaran dan penguatan legitimasi publik. Sementara itu, dalam penelitian Abdullah Adzka (2022) di SMP IT Rahmatan Lil Alamin Bogor, ditemukan bahwa penyusunan anggaran yang terfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa memberikan dampak signifikan terhadap mutu lulusan. Temuan ini sejalan dengan semangat perencanaan di MTsS Balimbing yang tidak hanya fokus

pada aspek infrastruktur, tetapi juga mendukung kebutuhan pembelajaran yang berkualitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing dilakukan melalui pendekatan strategis, partisipatif, dan adaptif. Strategi ini tidak hanya menjamin kelancaran operasional madrasah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokratis dan pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan pendidikan. Perencanaan yang baik menjadi pijakan awal bagi keberhasilan pelaksanaan program madrasah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## 2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya upaya yang serius dan sistematis dari pihak madrasah dalam mengelola dana pendidikan secara akuntabel, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan mengacu langsung pada Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disusun sebelumnya. Dana yang tersedia, khususnya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), digunakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan, ketersediaan sumber daya, serta efisiensi pengeluaran.

Kepala madrasah, bendahara, serta jajaran wakil kepala madrasah bertindak sebagai pengawas internal dalam pelaksanaan anggaran. Mereka melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pengadaan barang, jasa, serta pembangunan sarana fisik, agar seluruh proses tetap berjalan sesuai ketentuan. Sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat manual, yakni melalui pembukuan dan perangkat lunak sederhana seperti Microsoft Excel. Meskipun belum mengadopsi sistem berbasis digital seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau SIMDA, pengelolaan keuangan tetap dijalankan secara tertib dengan

pengawasan berlapis. Kondisi ini mencerminkan prinsip pengendalian internal dalam manajemen keuangan pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Fattah (2004), yang menyatakan bahwa pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan untuk mencegah penyimpangan serta kebocoran anggaran.

Temuan ini menunjukkan bahwa madrasah telah menerapkan prinsip dasar pengelolaan keuangan yang baik, meskipun belum berbasis teknologi informasi. Ini juga sejalan dengan prinsip good governance dalam manajemen pendidikan, di mana unsur transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga melalui keterlibatan tim pengelola yang bertanggung jawab dan adanya kontrol secara periodik. Praktik ini memperlihatkan bahwa teknologi bukan satu-satunya indikator profesionalitas dalam pengelolaan dana, namun integritas, kejelasan prosedur, dan keterbukaan menjadi kunci utama.

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan di MTsS Balimbing menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan dana, khususnya dalam mendukung program pembangunan dan pemeliharaan sarana serta prasarana madrasah. Dana BOS yang diterima umumnya lebih banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rutin, seperti operasional pembelajaran, pembayaran honorarium guru honorer, dan administrasi. Sementara itu, berbagai kebutuhan pengembangan fisik seperti perbaikan gedung, pembangunan ruang kelas, maupun pengadaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan sering kali tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Dalam menyikapi tantangan tersebut, pihak madrasah menunjukkan kreativitas dan inisiatif dalam menggali sumber-sumber dana alternatif. Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah dan guru, diketahui bahwa madrasah menggalang sumbangan dari masyarakat melalui berbagai cara. Salah satu bentuk inovatif adalah pengumpulan dana melalui kotak infaq setiap hari Jumat yang dikoordinasikan oleh guru. Selain itu, kegiatan turun ke bawah (turba) yang melibatkan siswa untuk mengunjungi masjid-masjid dengan surat

tugas resmi, juga menjadi strategi penggalangan dana yang memadukan unsur keagamaan, sosial, dan pendidikan.

Strategi penggalangan dana berbasis masyarakat ini mencerminkan prinsip pemberdayaan sosial dalam manajemen pendidikan. Menurut Sudarwan Danim (2010), sekolah sebagai lembaga publik harus mampu memobilisasi potensi internal dan eksternal secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, MTsS Balimbing berhasil memanfaatkan jejaring sosial keagamaan dan kearifan lokal sebagai sumber daya strategis. Hal ini juga selaras dengan pendekatan *community-based school management* yang dianjurkan oleh UNESCO (2005), di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek layanan pendidikan, tetapi juga mitra aktif dalam mendukung dan membiayai keberlangsungan lembaga pendidikan.

Kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembiayaan tidak hanya berupa dana tunai, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan bantuan material. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa dan guru, ketika ada kegiatan pembangunan ruang kelas atau perbaikan fasilitas, masyarakat turut berpartisipasi dengan cara menyumbangkan bahan bangunan atau membantu tenaga kerja. Model kontribusi ini menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya mengandalkan dana formal dari pemerintah, tetapi juga mengembangkan kolaborasi yang erat dengan masyarakat sekitar. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, seperti musyawarah, mufakat, dan semangat kebersamaan.

Secara teoretis, bentuk pelaksanaan seperti ini berkaitan erat dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pembiayaan. Rusdiana (2022) menjelaskan bahwa efektivitas menyangkut sejauh mana penggunaan dana mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan efisiensi berfokus pada bagaimana dana digunakan seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal. Pelibatan masyarakat melalui kontribusi non-finansial dapat dipahami sebagai strategi untuk

meningkatkan efisiensi pembiayaan, sekaligus memperluas dukungan tanpa menambah beban pengeluaran formal madrasah.

Penelitian ini juga memperkuat studi-studi sebelumnya seperti penelitian Zahrotul Mu'anis Sa'adah (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam bentuk dukungan moral dan material. Demikian pula penelitian Abdullah Adzka (2022) menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang dikelola secara kolaboratif, terbuka, dan fleksibel terhadap kondisi lokal mampu meningkatkan efektivitas program sekolah. Dalam konteks MTsS Balimbing, pelaksanaan pembiayaan yang bersifat terbuka, adaptif, dan berbasis nilai sosial menunjukkan bahwa madrasah telah mampu menyesuaikan diri dengan keterbatasan struktural dan mengubahnya menjadi kekuatan berbasis komunitas.

Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing tidak hanya merefleksikan implementasi teknis dari perencanaan keuangan, tetapi juga menjadi cerminan dari budaya manajemen kolektif yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, partisipasi, dan solidaritas sosial. Model pelaksanaan seperti ini penting untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama di madrasah swasta yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks pembiayaan terbatas. Kolaborasi antara pihak madrasah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kesinambungan program pendidikan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan di lingkungan madrasah.

Adapun langkah-langkah didalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan yaitu :

a. Penerimaan Dana

Pada tahap ini, lembaga pendidikan menerima dana dari berbagai sumber, seperti:

- 1). Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
- 2). Iuran peserta didik

3). Sumbangan dari masyarakat

4). Bantuan instansi pemerintah atau swasta

Penyaluran dana dilakukan berdasarkan jadwal yang telah yang telah ditentukan, dan semua penerimaan dicatat secara tertib. Tujuannya adalah memastikan seluruh dana yang masuk tercatat dan terdokumentasi dengan rapi sebagai dasar pertanggungjawaban.

b. Penggunaan Dana

Setelah dana diterima, tahap berikutnya adalah penggunaan sesuai dengan rencana anggaran. Penggunaan dana meliputi:

- 1). Biaya operasional harian sekolah
- 2). Pembayaran honorarium guru dan pegawai
- 3). Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- 4). Pemeliharaan sarana dan prasarana

Penggunaan dana harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang telah disusun sebelumnya.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Setiap penggunaan dana harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini disusun secara berkala dan disampaikan kepada:

- 1). Kepala madrasah
- 2). Komite sekolah
- 3). Kantor Kementerian Agama setempat

Langkah ini bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan.

Berdasarkan artikel karya Nofrion (2019), pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada madrasah mencakup tiga tahapan utama, yaitu penerimaan dana, penggunaan dana, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Penerimaan dana berasal dari berbagai sumber dan dicatat secara tertib. Penggunaan dana disesuaikan dengan rencana

anggaran yang telah disusun sebelumnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Ketiga tahap ini saling berkaitan untuk memastikan pengelolaan dana pendidikan berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Adapun dalam hal perencanaan dan pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar juga terdapat kontribusi dari orang tua siswa dan masyarakat yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan orang tua siswa, diketahui bahwa mereka tidak dibebani dengan kewajiban membayar iuran pendidikan secara langsung di MTsS Balimbing. Hal ini sesuai dengan kebijakan madrasah yang menetapkan pendidikan gratis bagi seluruh peserta didik. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak serta merta mengurangi peran serta masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan. Justru dalam berbagai kegiatan non-rutin, seperti pembangunan, perbaikan fasilitas, atau pelaksanaan acara keagamaan dan sosial, para orang tua tetap menunjukkan sikap kooperatif dan aktif berpartisipasi secara sukarela. Bentuk partisipasi tersebut tidak dalam wujud dana tunai, melainkan kontribusi berupa tenaga kerja, bahan material, atau dukungan logistik.

Temuan ini mencerminkan terbangunnya relasi sosial yang kuat antara madrasah dan masyarakat sekitarnya. Komunikasi antara pihak madrasah dan orang tua dilakukan secara terstruktur melalui forum-forum resmi seperti rapat komite, pertemuan wali murid, atau diskusi musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat. Dalam rapat-rapat ini, pihak sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana, rencana kegiatan, serta kebutuhan pendukung yang membutuhkan kolaborasi masyarakat. Keterbukaan informasi ini menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pengelolaan madrasah.

Secara teoritis, kondisi ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dalam pendidikan sebagaimana dirumuskan oleh UNESCO (2005), yang menekankan pentingnya keterbukaan

(transparency), partisipasi (participation), dan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan lembaga pendidikan. MTsS Balimbing menunjukkan bahwa sekalipun tanpa kontribusi finansial formal dari orang tua, madrasah mampu membangun pola hubungan yang partisipatif dan kolaboratif dengan masyarakat. Ini juga memperkuat gagasan bahwa partisipasi dalam pendidikan tidak harus dalam bentuk materi, melainkan dapat diaktualisasikan melalui dukungan moral, sosial, dan tenaga kerja yang konkret.

Lebih jauh, model partisipasi non-finansial yang dikembangkan oleh MTsS Balimbing mencerminkan penerapan konsep Community-Based Management (CBM) dalam pendidikan. Menurut pendekatan CBM yang dikembangkan UNESCO (2005), masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pendidikan, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam mendukung manajemen sekolah melalui berbagai bentuk kontribusi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Dalam konteks ini, peran orang tua dan masyarakat sekitar tidak dapat dipandang sekadar sebagai pihak eksternal, melainkan sebagai mitra sejajar dalam proses pendidikan.

Kondisi yang ditemukan di MTsS Balimbing juga sesuai dengan pandangan Arikunto (2010), yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan berbasis masyarakat akan lebih efektif ketika proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pendidikan dilakukan melalui dialog dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, madrasah bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan kebutuhan lembaga dengan potensi dukungan dari lingkungan sosial.

Secara kultural, partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dan sumbangan material juga mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan kebersamaan. Hal ini memberikan keunikan tersendiri dalam model manajemen pembiayaan yang diterapkan MTsS Balimbing, karena memadukan pendekatan teknokratis (dalam hal penyusunan RKAM dan

pelaporan keuangan) dengan pendekatan kultural berbasis nilai lokal. Gabungan ini menciptakan sistem pengelolaan yang tidak hanya efektif dari sisi manajemen, tetapi juga kuat secara sosial dan berakar dalam budaya komunitas.

Penelitian ini juga memperkuat hasil studi yang dilakukan oleh Zahrotul Mu'anis Sa'adah (2022), yang menemukan bahwa keberhasilan manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dan pola komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dan warga. Dalam konteks MTsS Balimbing, komunikasi yang terjaga dengan baik melalui forum rapat dan keterbukaan informasi telah mendorong masyarakat untuk merasa memiliki terhadap madrasah. Mereka tidak merasa diminta, tetapi merasa terpanggil untuk terlibat.

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Abdullah Adzka (2022), yang menggarisbawahi bahwa sekolah/madrasah yang mampu membangun sistem pengelolaan partisipatif cenderung memiliki stabilitas pembiayaan yang lebih baik dan keberlangsungan program yang lebih terjamin. Partisipasi orang tua dalam bentuk non-finansial terbukti mampu menutupi celah yang tidak dapat dipenuhi oleh dana formal seperti BOS, terutama untuk kegiatan pembangunan fisik dan penyelenggaraan program kultural keagamaan.

Dengan demikian, peran orang tua dan masyarakat di MTsS Balimbing dalam mendukung pembiayaan pendidikan telah menunjukkan bentuk ideal dari keterlibatan publik dalam pengelolaan lembaga pendidikan berbasis komunitas. Partisipasi ini tidak hanya bernilai instrumental dalam hal dukungan sumber daya, tetapi juga memiliki nilai simbolik sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pendidikan generasi muda. Model kolaborasi ini layak dijadikan referensi bagi madrasah lain yang menghadapi keterbatasan dana, namun memiliki potensi sosial yang besar dalam komunitasnya.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing menunjukkan bahwa penguatan hubungan

sosial antara madrasah dan warga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pendidikan yang tangguh, berdaya, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif yang berbasis nilai lokal dan prinsip tata kelola yang baik, madrasah tidak hanya berhasil menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan pembinaan karakter masyarakat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara sistematis dan melibatkan beberapa pihak, antara lain kepala madrasah, bendahara, dan wakil kepala madrasah. Perencanaan ini disusun pada awal semester, pertengahan semester, dan akhir tahun. Dalam aspek sarana dan prasarana, perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan mempertimbangkan ketersediaan dana. Dana utama berasal dari BOS, namun pihak madrasah juga aktif mencari dukungan dari donatur seperti alumni dan simpatisan masyarakat melalui proposal kegiatan, kotak infak Jumat, dan pendekatan ke pengurus masjid.
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing dilakukan dengan prinsip gotong royong dan transparansi. Untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan, pihak sekolah melibatkan wali murid dan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti gotong royong atau bantuan berupa bahan bangunan. Pengawasan pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh kepala madrasah, wakil kepala, serta jajaran yang ditunjuk agar tetap sesuai dengan rencana dan anggaran. Kendala utama dalam pelaksanaan pembiayaan adalah keterbatasan dana, namun pihak sekolah berupaya mengatasinya dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak eksternal.
3. Kontribusi orang tua dalam pembiayaan pendidikan di MTsS Balimbing secara umum tidak berupa dana rutin karena sekolah tidak memungut biaya pendidikan. Namun, orang tua tetap berpartisipasi melalui bentuk gotong royong atau bantuan sukarela ketika diperlukan. Komunikasi antara

pihak sekolah dan orang tua dilakukan melalui pertemuan dan rapat resmi untuk menyampaikan rencana dan kebutuhan sekolah.

## B. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam konteks pengelolaan pembiayaan di madrasah swasta berbasis masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara sekolah dan masyarakat dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran pendidikan.

### 2. Implikasi Praktis

#### a. Bagi Kepala Madrasah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan, serta memperkuat perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak secara transparan dan akuntabel.

#### b. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian ini memberi gambaran pentingnya keterlibatan tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan pembiayaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pembelajaran dan sarana yang memadai.

#### c. Bagi Orang Tua/Wali Murid

Penelitian ini menegaskan pentingnya peran serta orang tua dalam bentuk dukungan non-finansial, seperti gotong royong dan kepercayaan kepada sekolah dalam mengelola dana demi kepentingan bersama.

#### d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang strategi manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan lain, khususnya di sekolah/madrasah berbasis masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya.

### C. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Kepala Madrasah, diharapkan terus meningkatkan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, memperluas kerja sama dengan masyarakat dan donatur, serta melakukan evaluasi secara berkala.
2. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, disarankan untuk aktif dalam proses perencanaan sarana pembelajaran serta menjaga komunikasi yang baik dengan pimpinan dan orang tua agar tercipta manajemen pembiayaan yang efektif.
3. Bagi Orang Tua/Wali Murid, meskipun tidak diwajibkan memberikan dana, diharapkan tetap menjaga semangat gotong royong dan mendukung kegiatan sekolah yang membutuhkan kontribusi secara moral maupun material.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan dana dalam peningkatan mutu pembelajaran, serta menggali bentuk inovasi pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lokal masing-masing sekolah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amra, Abhanda. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam Untuk Pendidikan Tinggi*. Batusangkar: Batusangkar pres.
- Amini, A., Pane, D., & Akrim, A. (2024). Manajemen Pendidikan: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian Sumber Daya Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 45-60.
- Ardiansyah, R., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Arvyanda. (2023). Data Sekunder sebagai Sumber Data Penelitian. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1, 1-10.
- Habibi, A., Putera, L., & Riswanda, N. (2022). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25-39.
- Hardani, R. M., Ulfatin, N., & Fattah, N. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.
- Jurnal Indopedia. (2023). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 78-90.
- Jurnal Indopedia. (2023). Transparansi dalam Pengelolaan Dana Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 78-90.
- Kamaruddin, A., Sari, N., & Rahman, F. (2022). Manajemen Pendidikan: Pendekatan Sistematis dan Strategis dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 5(2), 120-134.
- Kementrian Agama Repoblik Indonesia. (2022). *Al-Quran Al Qarim*. Jakarta: Lajnah Penasbihan Mushaf Al-Quran
- Kurniasih, D. (2024). *Manajemen Sumber Daya Organisasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, A. (2021). Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol dan George R. Terry. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 123-134.
- Maharani, N. A., Sari, N., & Putri, D. (2024). Peran Pemerintah dalam Pembiayaan Pendidikan: Studi Program Dana BOS dan BSM. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 5(2), 120-134.

- Mohammad Rojii. (2018). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasser, M. (2021). *Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Nursobah. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhidayah, R. E. (2024). *Instrumen Penelitian: Kupas Tuntas Menyusun Instrumen Disertai Contoh, Kisi-Kisi, dan Cara Penilaiannya*. Penerbit NEM.
- Nasution, S. (dalam Sugiyono). (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (hal.109). Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi Bernadetta Purba. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. (2023). Instrumen Tes dan Non Tes pada Penelitian. *Pendas*, 8(3), 6538.
- Rusdiana, R. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Teori dan Praktik Pengelolaan Dana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rudani, R. (2020). *Prinsip-Prinsip Manajemen: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengendalian*. Bandung: Alfabeta.
- Rusdiana, R. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Teori dan Praktik Pengelolaan Dana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Rusdiana, H. A., & Hidayat, A. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rukin, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sudarmono, A., Sari, D. P., & Wibowo, H. (2020). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salehah. (2018). *Pengantar Manajemen: Teori dan Praktik Pengelolaan Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhardi, & Eliyana, A. (2018). *Manajemen: Konsep dan Aplikasi dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

- Scribd. (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Model*.
- Santoso, B. (2018). *Manajemen Keuangan Pendidikan: Prinsip dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undari Sulung, & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5(3), 105-120.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Yuliana, Y., Sari, N., & Putri, D. (2024). Optimalisasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 5(2), 120-134.
- Yuliana, L. (2024). *Manajemen Pendidikan: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Yuliana, L., Sari, N., & Putri, D. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 5(2), 120-134.
- Yuliana, L., Sari, N., & Putri, D. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 5(2), 120-134.
- Zulkarmain. (2020). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Jangan Karena Mahal Sekolah Batal*. Yogyakarta